

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENCAPAIAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA
KAB.SLEMAN PERIODE 2006-2011**



Nomor Mahasiswa : 08312429

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENCAPAIAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KAB.SLEMAN
PERIODE 2006-2011**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat

Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

oleh:

Nama : Hermawan

Nomor Mahasiswa : 08312429

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, 1 Februari 2012

Penyusun

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL

F68CDAAF866219206

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

(Hermawan)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
PENCAPAIAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA
KAB.SLEMAN PERIODE 2006-2011**

Hasil Penelitian

diajukan oleh:

Nama : Hermawan

Nomor Mahasiswa : 08312429

Telah dietujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Feb 2012

Dosen Pembimbing



Kesit Bambang P.,Drs.,M.Si.

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP
Pratama Kabupaten Sleman 2006 - 2011**

**Disusun Oleh: HERMAWAN
Nomor Mahasiswa: 08312429**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Maret 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si
Penguji : Hendi Yogu P, SE, M.For.Accy, Ph.D



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN MOTTO

**Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai dari suatu tugas,
mulailah dengan tugas yang lain dengan sungguh-sungguh,
dan hanya pada Tuhanmu lah kamu berharap.**

(QS. Asy Syarh : 6-8)

**Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah
terjadi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini
melakukan yang terbaik. Tuhan pasti kan menunjukkan kebesaran dan kuasa-
Nya bagi hamba Nya yang sabar dan tak kenal putus asa.**

(D'Massiv)

**Semua orang yang sukses dan bahagia adalah mereka yang bebas, artinya
mereka bisa menentukan sendiri apa yang dipikirkan, apa yang harus dipilih
dan apa yang harus dilakukan, ketika kita bersikap demikian semua arah
pikiran dan sikap kita akan bermuara pada kreativitas dan orisinalitas**

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Teriring sujud syukur yang tak terkira ke hadirat Allah SWT atas segala
Rahmat dan Karunia-Nya selama rentang waktu kehidupan yang kujalani
Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk:**

“Ayah dan Ibu tercinta, Ikhsan S. dan Indah S.

**Kuucapkan terima kasih atas untaian do’a yang selalu mengalir, perhatian
dan kasih sayang yang tiada ujung serta ketulusan, pengorbanan, dan
kesabaran dalam membesarkan, merawat dan mendidiku”**

**“Kakak dan adikku tersayang
serta keluarga besar di Wonosobo**

**Ku ucapkan terimakasih atas curahan kasih sayang serta selalu
membimbingku dan memberiku motivasi”**

“Maya, wanita yang kini jadi penyemangatku”

**“Untuk bekal ilmu dan kebanggaan almamaterku
yang telah menghantarkanku menjadi sarjana”**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah Nya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCAPAIAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KAB.SLEMAN PERIODE 2006-2011”**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala karunia Nya, hidayah serta kasih sayang Nya.
2. Kitab suciku Al Qur'an.
3. Ayah dan Ibu saya yang selalu mendoakan dan membimbing dalam cinta dan kasih sayang yang tulus.
4. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Isti Rahayu selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Kesit Bambang P.,Drs.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi UII.
8. Ibu Endang selaku sekretariat di KPP Pratama Sleman atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama ini dalam pengumpulan data penelitian.
9. Kepada seluruh staf pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY atas kemudahan dan keramahannya ketika penulis melakukan penelitian.
10. Saudara kandungku Martin, Angrum, Hanif, dan Fariz yang selalu menyayangi dan memberi warna dihidupku.
11. Bibi dan Simbah yang telah merawat dan mendidikku dari kecil tanpa kenal lelah.
12. Teman-teman kontrakan "KONDANG" Bangun, Bule, Mbah Marjo, Destha, Aldo, Yudho, Adel, Nohan, Ryan, Gembol terimakasih atas support dan canda tawanya.
13. Teman-teman kos "112B" Gendut, Ito, Adi, Nanta, Fleber terima kasih atas support dan canda tawanya.
14. Teman-teman kontrakan ke-2 ku Riza, Zakka, Faiz, Surip, Poltak.
15. Teman-teman KKN KL-68 Lambang, Vanda, Ichal, Fardha, Novita, Fani, Hanayuki.
16. Teman-teman UKM futsal FE UII.
17. Elsa dan Danan yang selama ini telah banyak membantu dan membimbingku.
18. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008 FE UII yang tidak bisa disebutkan satupersatu.

19. Pak Min dengan soto depan kos Rp 4500,- free ongkir.
20. Bu kos, Siyem, Jamal, Fina “Laundry+Angkringan” dan Badari “resto”
21. Maya cewe “unyu” yang sekarang mengisi ruang kosong di hatiku.
22. Dan semua pihak, sahabat, teman, sodara yang tidak bisa saya sebutkan satupersatu, terima kasih untuk semuanya.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 1 Februari 2012

Penulis

Hermawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BERITA ACARA	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAKSI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	9
1.3.Batasan Masalah	9
1.4.Tujuan Penelitian	10

1.5. Manfaat Penelitian	11
1.6. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	KAJIAN TEORI
2.1. Logika Teoritik	16
2.1.1. Sistem Pengendalian Intern	16
2.1.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern	16
2.1.1.2. Konsep Dasar Sistem Pengendalian Intern ..	18
2.1.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	24
2.1.1.4. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern ...	25
2.1.2. Pajak	25
2.1.2.1. Pengertian Pajak	25
2.1.2.2. Prinsip-Prinsip Perpajakan	26
2.1.2.3. Fungsi Pajak	27
2.1.2.4. Jenis-Jenis Pajak	28
2.1.2.5. Asas Pengenaan Pajak	31
2.1.2.6. Sistem Pemungutan Pajak	32
2.1.3. Pajak Penghasilan	33
2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan	33

	2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan	34
	2.1.3.3. Tidak Termasuk Subjek Pajak	35
	2.1.3.4. Objek Pajak	36
	2.1.3.5. Tidak Termasuk Objek Pajak	38
	2.1.3.6. Dasar Hukum	40
	2.2. Telaah Pustaka	40
	2.3. Hubungan Variabel Dependen Dengan Variabel Independen ..	41
	2.4. Kerangka Pemikiran	44
	2.5. Hipotesis Penelitian	44
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Populasi dan Sampel	46
	3.2. Metode Pengumpulan Data	46
	3.3. Variabel Penelitian	47
	3.4. Metode Analisis	49
	3.5. Pengujian Hipotesis	50
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Analisis Data	54

4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian	54
4.1.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman	54
4.1.1.2. Wilayah Kerja	55
4.1.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan	55
4.1.1.4. Aktivitas Kegiatan KPP Pratama Sleman	59
4.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan	59
4.1.1.6. Penagihan Pajak	59
4.1.2. Deskripsi Data	60
4.1.3. Profil Responden	61
4.2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pada KPP Pratama Sleman	67
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian	75
4.4. Uji Kualitas Data	76
4.5. Uji Asumsi Klasik	80
4.6. Uji Regresi Linier Berganda	83
4.7. Uji Statistik	87

4.8. Pembahasan	91
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan	96
5.2. Keterbatasan	97
5.3. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN

- 1.1. Surat Permohonan Izin Penelitian
- 1.2. Surat Pemberian Izin Penelitian Oleh KPP Pratama Sleman
- 1.3. Surat Pengantar Kuisisioner
- 1.4. Kuisisioner
- 1.5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- 1.6. Hasil Uji Statistic Deskriptif
- 1.7. Hasil Uji Normalitas Data
- 1.8. Hasil Uji Linier Berganda
- 1.9. Daftar Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan WP Pribadi
- 1.10. Rekapitulasi Data Kuisisioner

DAFTAR TABEL

Tabel.	4.1. Profil Responden Berdasarkan Jabatan	61
	4.2. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
	4.3. Profil Responden Berdasarkan Usia	62
	4.4. Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja	63
	4.5. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	64
	4.6. Profil Responden Berdasarkan Jurusan	65
	4.7. Profil Responden Berdasarkan Sertifikasi	65
	4.8. Profil Responden Berdasarkan Pelatihan yang Pernah Diikuti	66
	4.9. Profil Responden Berdasarkan Pengetahuan Perpajakan	67
	4.10. Kriteria Presentase Tanggapan Responden	68
	4.11. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Lingkungan Pengendalian	69
	4.12. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penilaian Resiko	70
	4.13. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Aktivitas Pengendalian	71
	4.14. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Informasi dan Komunikasi	72
	4.15. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan	73
	4.16. Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Intern	74
	4.17. Daftar Skor Rata-rata Hasil Kuisisioner	75

4.18. Daftar Presentase Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan	
Wajib Pajak Orang Pribadi	76
4.19. Case Processing Summary	77
4.20. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item-item Variabel	78
4.21. Hasil Uji Reliabilitas	79
4.22. Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	80
4.23. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF	82
4.24. Variabel Masuk atau Keluar	83
4.25. Model Summary	83
4.26. Anova	84
4.27. Hasil Regresi Linier Berganda Metode OLS	85
4.28. Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Intern	92

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kab.Sleman Periode 2006-2011”. Bertujuan untuk mengetahui seberapa besar system pengendalian intern memberikan kontribusi terhadap pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana penerapan system pengendalian intern pada KPP Pratama Sleman sampai saat ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif dengan presentase serta analisis regresi linier berganda, dengan data sekunder yang bersumber dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY. Pengujian kualitas data meliputi validitas dan reliabilitas, pengujian statistic meliputi uji F, uji t, dan R^2 (koefisien determinasi) serta uji asumsi klasik yaitu uji normalitas data dan multikolinearitas.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa system pengendalian intern memberikan kontribusi yang baik terhadap anggaran penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Sleman dan penerapan system pengendalian intern dikategorikan sudah baik. Untuk pengujian terhadap uji asumsi klasik variable independen berdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinearitas.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan demi mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan masyarakatnya. Ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara bersangkutan. Untuk melaksanakan program pembangunan yang dilakukan di berbagai aspek kehidupan serta untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, sudah tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Dana yang didapat untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan pemerintahan tersebut dapat berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Namun, karena Indonesia masih mempunyai hutang kepada negara lain maka pemerintah tidak bisa terus bergantung pada pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan dan menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada, yaitu perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 meningkat. Sebelumnya pada tahun 2010 penduduk Indonesia berjumlah 237,6 juta jiwa, pada tahun 2011 menjadi 241 juta jiwa. Hal ini merupakan potensi sumber daya yang dapat memberikan pasokan dana cukup besar kepada pemerintah terutama dari hasil pemungutan pajak.

Departemen Keuangan Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, mengatakan bahwa, Pemerintah terus berupaya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional

berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawaskan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pendapatan negara dari penerimaan APBN sampai dengan bulan Februari 2011 sebesar Rp108,1 triliun naik 12,7% dari tahun sebelumnya adalah berasal dari penerimaan perpajakan yang untuk penerimaan Pajak Penghasilan sendiri sebesar Rp47,2 triliun atau 12,9% dari target yang mana mengalami kenaikan sebesar 26,9% dari tahun 2010 (*www.tempointeraktif.com*).

Dari uraian diatas jelas sekali terlihat, pendapatan negara dari sektor pajak sangatlah besar. Ini membuktikan bahwa pajak sangat berperan aktif dalam pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia serta untuk membayar utang-utang luar negeri. Sedangkan realisasi dana penerimaan pajak untuk pembangunan yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi prioritas adalah untuk peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja; revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan pedesaan; percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri dan penanganan bencana, pengurangan risiko bencana dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Kesadaran pemerintah akan besarnya potensi pendapatan negara dari sector pajak, membuat pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan pendapatan pajak tahun demi tahunnya. Salah satunya adalah dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak, yaitu diberlakukannya *Self Assesment System* dari tahun 1984. *Self Assesment System* ini merupakan

sistem pemungutan pajak yang mana pemerintah memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak tertanggungnya. Tujuan pemerintah menerapkan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak, adalah untuk mempermudah para Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya, akan tetapi ada juga Wajib Pajak (WP) yang malah memanfaatkannya, karena dari proses menghitung, menyetor dan melapor dilakukan sendiri, memberikan kesempatan untuk dapat memanipulasi jumlah pajak tertanggungnya. Selain itu, kesalahan dalam menghitung besarnya pajak tertanggung ataupun kesalahan dalam menggunakan peraturan Perpajakan, karena sering mengalami perubahan.

Untuk dapat menghindari hal-hal di atas, maka pemerintah memerlukan suatu kegiatan yang dapat mengawasi pelaksanaan dari *self assessment system* tersebut, agar dapat berjalan dengan baik sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menghitung besarnya pajak tertanggung ataupun kesalahan dalam menggunakan peraturan Perpajakan dan tindak pidana dalam Perpajakan dapat segera ditindaklanjuti. Kegiatan tersebut adalah dilakukannya pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak (WP) yang mengajukan Surat Keterangan Lebih Bayar (SKPLB) dan kepada Wajib Pajak (WP) yang diprediksi melakukan tindak pidana Perpajakan. Selain sebagai alat untuk mengawasi jalannya *self assessment system* yang telah diterapkan, tujuan lainnya dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan dalam rangka memberi kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak serta dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

Selain menerapkan *self assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah juga melakukan beberapa Reformasi Perpajakan yaitu :

- a. Reformasi Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang terdiri dari:
1. Adanya fungsi baru pada kantor modern Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu fungsi *Account Representative* (AR).
 2. Adanya perubahan jenis kantor dengan adanya penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), menjadi satu kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- b. Reformasi Proses Bisnis, yang terdiri dari :
1. Reformasi Metode Kerja yaitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkini.
 2. Reformasi pada Prosedur yaitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menulis ulang *Standard Operating Procedures* (SOP) yang digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
 3. Reformasi pada Sistem yaitu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dengan aplikasi yang berbasis *web* dan lebih *user friendly*.
- c. Reformasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup, pelaksanaan *Account Representative* dan pelaksanaan system remunisasi, dimana pegawai di kantor modern mendapatkan tunjangan yang lebih tinggi dibandingkan kantor lain yang belum menerapkan sistem administrasi Perpajakan modern. (www.pajak.go.id)

Namun dari beberapa reformasi yang dilakukan pemerintah seperti yang telah diuraikan tersebut, tidak semuanya menjadi lebih baik terutama berkurangnya jumlah petugas pemeriksa (fiskus) pada bagian pemeriksaan pajak. Hal tersebut ditegaskan oleh Darmin, bahwa kekurangan jumlah pemeriksa baru dapat dirasakan setelah Ditjen Pajak melaksanakan

Reformasi Perpajakan. Sebelum dilakukan Reformasi Perpajakan, pihak yang bukan merupakan pemeriksa pajak (fiskus) dibolehkan melakukan pemeriksaan pajak. Namun setelah dilakukan Reformasi Perpajakan dan dibuat aturan yang jelas, bahwa hanya pemeriksa pajak (fiskus) yang boleh melakukan kegiatan pemeriksaan pajak, jumlah petugas pemeriksa pajak menjadi berkurang banyak. (Berita Perpajakan : www.pajak.go.id)

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengakui, bahwa minimnya jumlah petugas pemeriksa pajak (fiskus) telah menyebabkan setoran pajak yang dihasilkan menjadi kurang maksimal. Jumlah pemeriksa pajak (fiskus) di Indonesia per Juni 2010 hanya 4.382 orang, jumlah ini jauh dari jumlah ideal yakni 8000 orang dari keseluruhan jumlah pegawai pajak yang ada, yaitu sebanyak 32.000 petugas, sedangkan jumlah Wajib Pajak (WP) telah mencapai 18,78 juta per September 2010 (www.pajakonline.com)

Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu : Pemeriksaan rutin, Pemeriksaan khusus dan pemeriksaan dengan tujuan lain. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak (WP) berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajibannya. Pemeriksaan rutin pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY ini dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu : pemeriksaan mencakup *all taxes* dan *single*/beberapa jenis pajak.

Pemeriksaan rutin *all taxes*, maksudnya 1 Wajib Pajak (WP) dilakukan pemeriksaan terhadap semua jenis pajak yang ditanggungnya seperti : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Bea Materai. Sedangkan pemeriksaan rutin *single*/beberapa jenis pajak, maksudnya 1 Wajib Pajak (WP) hanya dilakukan pemeriksaan terhadap 1 atau lebih dari 1 jenis pajak saja yang dianggap perlu dilakukan pemeriksaan, bisa dikarenakan Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan Lebih Bayar (SPTLB),

bisa dikarenakan adanya perbedaan hasil perhitungan Wajib Pajak (WP) dengan petugas pajak dan bisa juga dikarenakan Wajib Pajak tersebut diindikasikan melakukan tindak pidana Perpajakan.

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) maksudnya, petugas pajak melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang beresiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak.

Pemeriksaan dengan tujuan lain pada dasarnya lebih kepada pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan kepada Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban membayar pajak namun belum memiliki NPWP dan untuk penghapusan NPWP kepada perusahaan yang telah bangkrut dan tidak bisa memenuhi kewajiban Perpajakannya serta pengukuhan atau pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY memerlukan suatu sistem yang dapat mengatur tercapainya target penerimaan pajak tiap tahunnya, salah satunya dengan membuat perencanaan pemeriksaan yang baik sehingga tidak ada lagi tunggakan pemeriksaan pajak untuk tahun berikutnya. Selain itu, perlu adanya suatu sistem yang dapat mengatur besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pajak tersebut, agar penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Sistem tersebut adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) ini pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen, yang didalamnya mencakup pengendalian-pengendalian yang digunakan oleh suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah agar dapat menjamin bahwa tujuan organisasi tersebut dapat tercapai. Tujuan dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah

untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta untuk mendorong efisiensi dan ditaatinya kebijakan manajemen. Seorang pemeriksa (auditor) melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern agar dapat menentukan luas lingkup pemeriksaan yang kemudian informasi tersebut akan digunakan sebagai perencanaan pemeriksaan. Adapun unsur-unsur komponen-komponen yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Inter (SPI), meliputi :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penentuan resiko
3. Pengendalian aktivitas
4. Informasi dan komunikasi, serta
5. Pemantauan

Aktivitas KPP Pratama Sleman adalah memastikan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, yaitu menghitung dan menyetorkan hutang pajaknya yang sebenarnya dengan tepat waktu. Diharapkan dengan adanya pengendalian intern akan meningkatkan kinerja aktivitas KPP Sleman dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Jadi, dengan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang pada penerapan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY diistilahkan dengan sebutan *Standard Operating Procedures* (SOP), maka petugas pemeriksa pajak dapat membuat perencanaan dan pemeriksaan yang lebih baik lagi sehingga target penerimaan pajak setiap tahunnya dapat tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang ada. Perencanaan dan pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menyusun daftar persiapan-persiapan pemeriksaan pajak. Persiapan pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan tindakan pemeriksaan

pajak mulai dari mempelajari berkas Wajib Pajak (WP), menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (SPT), mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menentukan buku dan dokumen yang akan dipinjam serta menyediakan sarana pemeriksaan. Apabila Sistem Pengendalian Intern (SPI)/*Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para petugas pemeriksanya, maka perencanaan dan pemeriksaan pajakpun dapat dilaksanakan dengan baik pula, sehingga dapat tercapainya target penyelesaian pemeriksaan setiap tahunnya dan dapat mengatur besarnya biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pemeriksaan pajak agar tidak lebih besar dari penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCAPAIAN ANGGARAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KAB.SLEMAN PERIODE 2006-2011”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah kemukakan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya beberapa Reformasi Perpajakan yang salah satunya adalah Reformasi dalam Prosedur sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menulis ulang *Standard Operating*

Procedures (SOP) yang digunakan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

2. Setelah Reformasi Perpajakan dan dibuat aturan yang jelas, jumlah petugas pemeriksa pajak menjadi tidak seimbang dengan jumlah kasus yang harus diperiksa. Sehingga diperlukan suatu perencanaan pemeriksaan pajak agar dapat mengefisienkan waktu dan biaya pemeriksaan pajak.
3. *Standard Operating Procedures* (SOP) yang merupakan sistem pengendalian intern (SPI) pada KPP Pratama Sleman dan jumlah pegawai pajak yang terbatas, sehingga dengan pelaksanaan *Standard Operating Procedures* (SOP) yang baik, diharapkan dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan yang bisa memaksimalkan penerimaan pajak serta dapat mengefisienkan biaya pemeriksaan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama Sleman, DIY apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada ?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern terhadap peningkatan penerimaan pph wajib pajak orang pribadi ?

1.2.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi masalah pada penelitian ini sbb. :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada pegawai dan staf yang terdaftar di KPP Pratama Sleman, DIY.
2. Penulis hanya melakukan penelitian dalam hubungannya fungsi system pengendalian intern terhadap perubahan tingkat PPh yang diterima KPP Pratama Sleman, DIY.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai maksud dan tujuan bagi peneliti dan juga bagi instansi yang diteliti, adapun maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Maksud Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menunjang penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman,DIY.

b. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian intern pada KPP Pratama Sleman, DIY.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern dalam menunjang peningkatan penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman, DIY.

3. Memberi pengetahuan terhadap pembaca mengenai pentingnya sistem pengendalian intern dalam perusahaan pada umumnya, KPP Pratama Sleman, DIY pada khususnya.
4. Mengetahui kendala penerapan system pengendalian intern pada KPP Pratama Sleman, DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya : kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis ini mencakup kegunaan bagi perkembangan ilmu akuntansi, kegunaan bagi peneliti dan kegunaan bagi peneliti selanjutnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan tentang Perpajakan yang di gunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada petugas pemeriksa (fiskus) untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari sehingga dapat melengkapi bahan pembelajaran yang dibutuhkan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan tentang pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dapat digunakan sebagai alat kontrol atau alat pengendalian yang dapat mengatur jalannya kegiatan pemeriksaan dan penerimaan pajak agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target serta dapat

mengaplikasikan teori sistem pengendalian intern yang berhubungan dengan fungsi pengendalian intern terhadap perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan Perpajakan dan peranan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menunjang penerimaan pajak. Perbedaan antara Perpajakan sebelum adanya Reformasi dan Perpajakan setelah dilakukan Reformasi atau disebut sebagai modernisasi Perpajakan.

4. Bagi Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan, penelitian ini sebagai salah satu referensi pendidikan dalam fungsinya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan mahasiswa ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis adalah kegunaan yang ditujukan kepada instansi tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY secara keseluruhan dan bagi petugas pada bagian fungsional pemeriksaan pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kegunaan Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman D.I. Yogyakarta

Dengan dilakukannya penelitian ini pada KPP Pratama Sleman, DIY dapat berfungsi sebagai *second opinion* perusahaan dalam tujuannya membangun sistem pengendalian intern dengan maksud meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pajak

b. Kegunaan Bagi Petugas Di bagian Penerimaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para petugas penerimaan pajak, sehingga penerima pajak dapat merencanakan dengan baik apa yang akan dilaksanakan agar target penerimaan dapat tercapai serta dapat menilai kinerja dari para petugas penerimaan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya sedangkan waktu penelitian merupakan jangka waktu dilakukannya penelitian dari awal dilakukannya penelitian sampai dengan penelitian tersebut selesai dilaksanakan.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan disalah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman, yang berlokasi di Jalan Ringroad Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan secara sistematis agar hasil dan waktu yang diperoleh sesuai dengan harapan yang diinginkan maka diperlukan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Adapun pelaksanaan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang obyek yang diteliti, sumber data yang digunakan, dan pengukurannya.

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian masa depan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Logika Teoritik

2.1.1. Sistem Pengendalian Intern (SPI)

2.1.1.1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan. **IAI (2001 : 391.2)** mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah “Suatu yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut :

- a. Efektifitas dan efisiensi operasi
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Coso memandang pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Coso memperjelas bahwa pengendalian intern berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian intern bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam manajemen tersebut, tetapi merupakan integral dalam proses tersebut. Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi di atas adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian intern adalah suatu proses, ini berarti bahwa pengendalian intern merupakan cara untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern

- terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintegrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
- b. Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang dari berbagai jenjang dalam satuan organisasi termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.
 - c. Pengendalian intern hanya diharapkan memberikan keyakinan memadai bukannya keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh system pengendalian intern dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut.
 - d. Pengendalian intern adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain tumpang tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian, dan operasi.

Lawrence B. Sawyers (2005:57) mengemukakan teori yaitu unsur-unsur atau komponen system pengendalian internal meliputi :

Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan

Mulyadi (2001:67) “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”. Sistem pengendalian intern pada hakekatnya adalah

suatu mekanisme yang di desain untuk menjaga (preventif), mendeteksi (detectif), dan memberikan mekanisme pembetulan (correctif) terhadap potensi terjadinya kesalahan atau kelalaian maupun penyalahgunaan atau fraud.

2.1.1.2. Konsep dasar Sistem Pengendalian Intern

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsure pengendalian intern yang membentuk disiplin.

Berbagai factor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain :

1. Nilai integritas dan etika merupakan pertimbangan nilai, prefensi dan gaya manajemen. Integritas dan nilai etika membangun standar perilaku dan moral yang dipatuhi manajemen.
2. Komitmen terhadap kompetensi. Meliputi pertimbangan manajemen atas tingkat kompetensi untuk pekerjaan tertentu dan bagaimana tingkat tersebut diterjemahkan ke dalam persyaratan ketrampilan dan pengetahuan.
3. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit. Kesadaran pengendalian entitas sangat dipengaruhi oleh dewan komisaris dan komite audit. Atribut yang berkaitan dengan dewan komisaris atau komite audit ini mencakup independensi dewan komisaris atau komite audit dari manajemen, pengalaman dan tingginya pengetahuan anggotanya, luasnya keterlibatan dan kegiatan pengawasan,

memadainya tindakan, tingkat sulitnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dewan atau komite tersebut kepada manajemen dan interaksi dewan atau komite tersebut dengan auditor intern dan ekstern.

4. Filosofi dan gaya operasi manajemen. Meliputi pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau resiko usaha, sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran, laba, serta tujuan bidang keuangan dan sasaran operasi lainnya.
5. Struktur organisasi. Meliputi pertimbangan bentuk dan sifat unit-unit organisasi entitas termasuk organisasi pengolahan data serta hubungan fungsi manajemen yang berkaitan dengan pelaporan. Selain itu, struktur organisasi harus menetapkan wewenang dan tanggungjawab dalam entitas dengan cara yang semestinya.
6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab. Metode ini mempengaruhi pemahaman terhadap hubungan pelaporan dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam entitas.

Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab meliputi pertimbangan atas :

- 1) Kebijakan entitas mengenai masalah seperti praktik usaha yang dapat diterima, konflik kepentingan dan aturan perilaku.
- 2) Penetapan tanggung jawab dan delegasi wewenang untuk menangani masalah seperti maksud dan tujuan organisasi, fungsi operasi, dan persyaratan instansi yang berwenang.
- 3) Uraian tugas pegawai yang menegaskan tugas-tugas spesifik, hubungan pelaporan dan kendala.

- 4) Dokumentasi system computer yang menunjukkan prosedur untuk persetujuan transaksi dan pengesahan perubahan system.
7. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Praktik dan kebijakan karyawan berkaitan dengan pemekerjaan, orientasi, pelatihan, evaluasi, bimbingan, promosi, pemberian kompensasi dan tindakan perbaikan.

Kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab masa depan serta mencakup praktik-praktik seperti sekolah latihan dan seminar menunjukkan tingkat kinerja dan perilaku yang diharapkan. Promosi yang dipacu oleh penilaian kinerja berkala menunjukkan komitmen entitas terhadap kenaikan personel yang cakap ke tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi.

Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektifitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.

b. Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan penerimaan keuangan merupakan penidentifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan penerimaan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Resiko yang relevan dengan pelaporan penerimaan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negative berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan komnsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini :

- 1) Perubahan dalam lingkungan operasi
- 2) Personel baru
- 3) Sistem informasi baru atau yang diperbaiki
- 4) Pertumbuhan yang pesat
- 5) Teknologi baru
- 6) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- 7) Restrukturisasi korporat
- 8) Operasi luar negeri
- 9) Penerbitan standar akuntansi baru

c. Aktifitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian pengolahan informasi. Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek kelengkapan, ketepatan, dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokan luas aktivitas pengendalian system informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum

biasanya mencakup pengendalian atas operasi pusat data, pemerolehan dan pemeliharaan system aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer, dan lingkungan pemakai akhir (end-user). Pengendalian aplikasi berlaku untuk pengolahan aplikasi secara individual. Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya, dan diolah secara lengkap dan akurat.

2. Pemisahan tugas. Pembebanan tanggung jawab ke orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.
3. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Aktivitas ini mencakup keamanan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi, dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program computer dan *data files*, dan perhitungan secara periodic dan perbandingan dengan jumlah yang tercantum pada catatan pengendali. Luasnya pengendalian fisik yang ditujukan untuk mencegah pencurian terhadap aktiva adalah relevan dengan audit, adalah tergantung dari keadaan seperti jika aktiva rentan terhadap perlakuan tidak semestinya.
4. Review atas kinerja. Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja periode sebelumnya. Menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda (operasi atau

keuangan) satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan, serta review atas kinerja fungsional atau aktivitas.

d. Informasi dan komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi), dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. Komunikasi dapat mengambil berbagai bentuk seperti kebijakan, akuntansi, dan panduan pelaporan keuangan, serta memorandum. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan dan melalui tindakan manajemen.

Auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami :

1. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan.
2. Bagaimana transaksi tersebut dimulai.
3. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi.

4. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik (seperti computer dan electronic data interchange) yang digunakan untuk mengirim, memproses, memelihara, dan mengakses informasi.

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memonitor aktivitas entitas. Aktivitas pemantauan ini dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar dengan keluhan customer dan keluhan dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

2.1.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Seperti telah disebutkan di atas, tujuan struktur pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan yaitu :

- a. Keandalan informasi keuangan
- b. Mengamankan aktiva perusahaan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- d. Efektifitas dan efisiensi operasional

Karena tidak semua tujuan struktur pengendalian intern tersebut relevan dengan audit atas laporan keuangan, tanggung jawab auditor dalam memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua sebagaimana disajikan di atas hanya dibatasi pada golongan tujuan pertama-keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu auditor berkewajiban memahami struktur pengendalian intern yang ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia.

2.1.1.4. Keterbatasan Sitem Pengendalian Intern

Perlu diingat bahwa system pengendalian intern yang terbaik adalah bukan struktur pengendalian yang seketat mungkin secara maksimal, system pengendalian intern juga mempunyai keterbatasan atau kelemahan. Menurut Sanyoto (2007:253) keterbatasan atau kelemahan tersebut antara lain :

- a. Persekongkolan (kolusi)
- b. Perubahan
- c. Kelemahan Manusia
- d. Azaz biaya manfaat

2.1.2. Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro (1990) dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan adalah “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbul

atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut Soeparman Soemahamidjaja (1964) : “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Definisi penyelewengan pajak menurut Robert H. Anderson (1995) adalah “Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan oranglain yang berada padanya, benda dalam pengertian ini adalah setoran pajak dari wajib pajak”.

2.1.2.2. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Soemitro (1982) pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesamaan dan keadilan (equality and equity)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan (non- discrimination), sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.

2. Kepastian (certainty)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum.

3. Kenyamanan pembayaran (convenience of payment)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (convenient) dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

4. Pemungutan ekonomi (economics of collection)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien.

2.1.2.3. Fungsi Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan pemerintah bertujuan untuk membiayai pembangunan yang muaranya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Suparmoko (1986) selain bertujuan untuk membiayai pembangunan pemerintah pajak sebagai penerimaan pemerintah mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (budgetary)

Fungsi pajak sebagai anggaran yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan yang bersifat rutin.

b. Fungsi pengatur (regulatory)

Fungsi pajak sebagai pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya pada Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai atas barang dan jasa. Pajak ini dibayarkan oleh pihak produsen atau pihak yang menjual barang namun

dibebankan kepada konsumen atau pembeli secara eksplisit ataupun implisit dengan memasukkannya ke dalam harga jual barang atau jasa.

Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya. Misalnya pada pengenaan Pajak Penghasilan untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Wewenang Pemungutannya

1. Pajak Negara

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- a) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM)
- b) Pajak Penghasilan (PPh)
- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- d) Bea Materai
- e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

1) Pajak Propinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

a. Pajak Hotel.

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

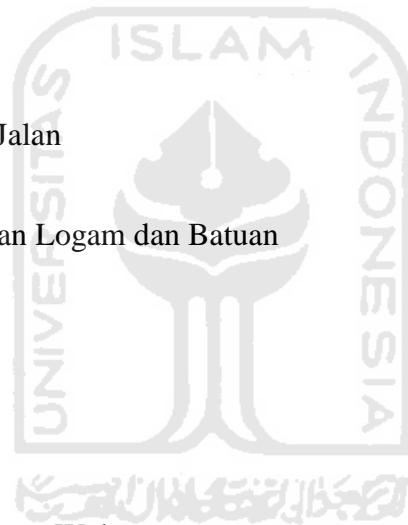
g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan



2.1.2.5. Asas Pengenaan Pajak

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang

pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu.

2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.

2.1.2.6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak diperlukan adanya sistem yang menunjang pemungutan pajak daerah tersebut. Sistem pemungutan pajak yang dikenal antara lain yaitu official assesment dan self asesment.

1. Sistem official assesment

Sistem Pemungutan pajak berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2. Sistem self asesment

Dalam sistem self asesment ini Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.1.3. Pajak Penghasilan (PPh)

2.1.3.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Soebakir, dkk (1999:41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pengertian pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian

tahun pajak. Tahun pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun pajak mengikuti tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Bagian tahun pajak adalah jangka waktu (hari/bulan) yang kurang dari 12 (dua belas) bulan saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim karena mengikuti tahun buku, tahun pajak ditentukan berdasarkan tahun yang memperoleh masa 6 bulan pertama kali.

2.1.3.2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Subjek Pajak terdiri dari :

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri adalah:

No	Uraian	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri Non-BUT
1	Penghasilan yang dikenakan pajak	Seluruh penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Penghasilan dari sumber penghasilan di Indonesia
2	Dasar pengenaan pajak dan tarif	Penghasilan neto dengan tarif umum	Penghasilan bruto dengan tarif sepadan
3	Kewajiban SPT	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

2.1.3.3. Tidak termasuk Subjek Pajak

1. Badan perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

- bukan warga Negara Indonesia; dan
- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan pekerjaannya tersebut; serta
- negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
- tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

- bukan warga negara Indonesia; dan
- tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.3.4. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
- keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

g. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

Objek Pajak yang dikenakan PPh final Atas penghasilan berupa:

- bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya;
- penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek;
- penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta
- penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.3.5. Tidak Termasuk Objek Pajak

1. a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, epanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak ybs.

2. Warisan

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
- bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.

2.1.3.6. Dasar Hukum

Landasan hukum Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang ditambah peraturan-peraturan yang mendukung di bawahnya, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah (PP)
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK)/ Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
3. Keputusan Dirjen Pajak (Kep)/ Peraturan Dirjen Pajak
4. Surat Edaran Dirjen Pajak (SE)

Undang-Undang yang mengatur pajak Penghasilan di Indonesia adalah undang-undang No 7 Tahun 1983. Undang-undang tersebut telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Undang-undang No 7 Tahun 1991, kemudian Undang-undang No 10 tahun 1994, dan yang terakhir dengan Undang-undang No 17 Tahun 2000 berlaku efektif mulai 1 Januari 2001.

2.2. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern, diantaranya dikutip dari beberapa sumber :

- a. Peneliti Anisa (2007) dalam skripsi berjudul “Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Reklame Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak

Reklame” menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) pajak reklame disadari sudah berjalan dengan baik, tidak terdapat pengaruh antara system pengendalian intern pajak reklame terhadap pencapaian target penerimaan pajak reklame.

b. Peneliti Trie (2007) dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor” menunjukkan bahwa :

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) pajak kendaraan bermotor di setiap Samsat sudah baik.
2. Tidak terdapat pengaruh antara pengendalian intern pajak kendaraan bermotor terhadap pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

2.3. Hubungan Antara Variabel Dependen dengan Variabel Independen

1. Hubungan antara lingkungan pengendalian dengan pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan.

Lingkungan pengendalian menetapkan suatu corak organisasi serta mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Corak organisasi terlihat dari gaya operasi manajemen. Hal ini meliputi sikap dan tindakan manajemen terhadap pelaporan keuangan dan upaya manajemen untuk mencapai anggaran penerimaan pajak dan sasaran operasi lainnya. Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak dibuat agar dapat memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten dalam setiap divisinya. Kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak

karena berhubungan dengan pelayanan pembayaran pajak yang disetorkan dengan mudah, baik dan cepat.

2. Hubungan antara penilaian resiko dengan pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan.

Penilaian resiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dan terus menerus dari manajemen Kantor Pelayanan Pajak. Dikatakan tidak terpisah karena manajemen tidak dapat menetapkan tujuan dan dengan mudah mengasumsikan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Penghasilan menunjukkan pengaruh langsung dari tren ekonomi pada umumnya terhadap wajib pajak bersangkutan yang mempunyai efek terhadap kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu perlu bagi KPP untuk mengambil langkah-langkah tertentu di dalam usaha memperkecil resiko ketidaktepatan penyetoran, penunggakan, dan kecurangan pengakuan jumlah kewajibannya.

3. Hubungan antara aktivitas pengendalian dengan pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan.

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk menghadapi resiko dalam pencapaian penerimaan pajak penghasilan. Salah satu prosedur yang berkaitan adalah pemisahan tugas. Pemisahan tugas perlu dilakukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan serta memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan prosedur-prosedur dalam melakukan penerimaan setoran pajak dari wajib pajak. Perlu dilakukannya pencocokan

antara pengendalian informasi bahwa transaksi adalah sah dan diotorisasi sebagaimana mestinya dengan pengendalian fisik yaitu jumlah penerimaan setoran pajak relevan dengan bukti formulir transaksi penyetorannya.

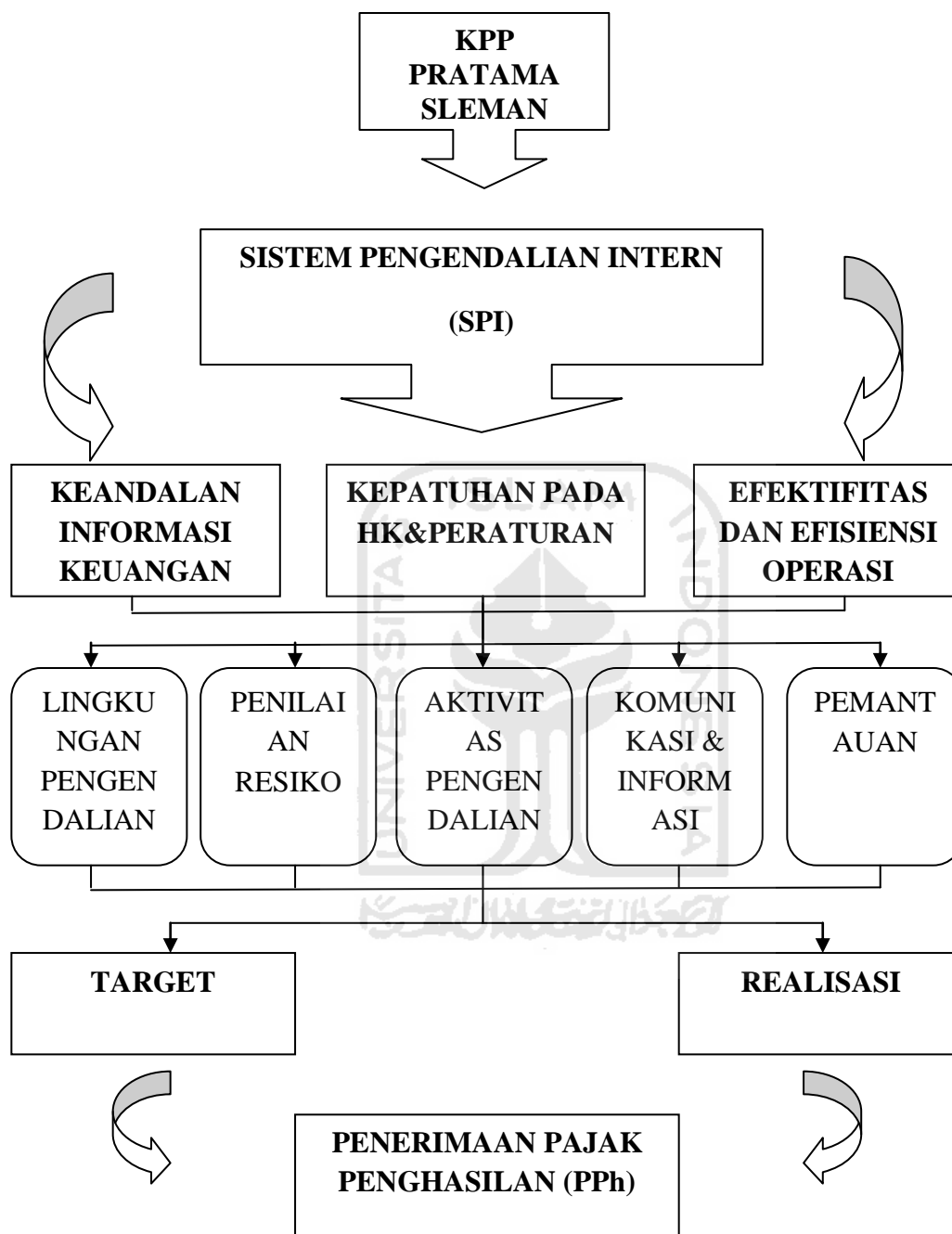
4. Hubungan antara informasi dan komunikasi dengan pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan.

Manajemen Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi dan komunikasi untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan untuk mengelola kegiatan operasinya. Untuk itu KPP memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pegawainya agar menguasai teknologi informasi dan komunikasi modern untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Hal ini tentunya memberikan pengaruh kepada petugas penerimaan setoran pajak dalam menganalisis profil dan kemampuan membayar pajak penghasilan Wajib Pajak yang sebenarnya.

5. Hubungan antara pemantauan dengan pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan.

Pemantauan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil penerimaan pajak penghasilan yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pemantauan perlu dilaksanakan untuk memastikan pegawai KPP melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya pemantauan kinerja akan mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pegawai KPP dalam menerima setoran pajak penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak.

2.4. Kerangka Pemikiran



2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti. Sugiono (2008: 96). Sedangkan menurut Iskandar (2008: 56) Hipotesis adalah suatu

pernyataan yang harus diuji kebenarannya karena masih merupakan dugaan sementara. Berdasarkan landasan teori dan aplikasi judul yang telah disusun, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_0 : sistem pengendalian intern pada KPP Pratama Sleman tidak meningkatkan pencapaian anggaran pph wajib pajak KPP Pratama Sleman, DIY.

H_1 : sistem pengendalian intern pada KPP Pratama Sleman meningkatkan pencapaian anggaran pph wajib pajak KPP Pratama Sleman, DIY.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari responden, dimana dalam penelitian ini yaitu pegawai pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY yang beralamat di Jl. Ringroad Utara No.10 Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Penulis memilih KPP Pratama Sleman sebagai obyek penelitian karena prestasi membanggakan KPP Pratama Sleman mengenai tingkat kepatuhan wajib pajaknya yang pada tahun 2010 menempati peringkat ke 8 nasional menyisihkan 341 KPP se-Indonesia. Untuk PPh orang pribadi, dari total wajib pajak PPh OP sebanyak 113.623 orang, tingkat kepatuhannya mencapai 99% lebih, dengan besar penerimaan Rp156,4 milyar untuk PPh yang dipotong melalui bendaharawan dan Rp8,92 milyar untuk yang disetorkan langsung.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dibuat oleh peneliti berdasarkan obyek penelitian. Data primer berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti dapat mengumpulkan secara teliti informasi yang diinginkan (Cooper dan William, 1996). Data primer didapat melalui kuisisioner. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh peneliti, untuk dimintakan jawabannya dari responden (Syamsul Hadi, 2004). Kuisisioner dalam penelitian ini nantinya akan disebarakan peneliti kepada pegawai KPP Pratama Sleman,

DIY. Wawancara adalah sebuah interaksi langsung antara peneliti dengan responden (Syamsul Hadi, 2004), serta didukung oleh data dari KPP Pratama Sleman, DIY yang berupa data penerimaan pajak penghasilan dan daftar pegawai pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Sleman, DIY mulai tahun 2006 sampai tahun 2011.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 1999:147). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sedangkan menurut Al Ghifari (2003:10), data sekunder adalah data yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga. Ini menunjukkan bahwa data sekunder sebelumnya sudah diolah terlebih dahulu.

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak, Badan Pusat Statistik dan internet guna mendukung data hasil interview dan kuesioner.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel yang terkait dengan judul penelitian ini antara lain :

1. Variabel Dependen adalah variable yang dipengaruhi oleh variable independen, yang termasuk variable dependen dalam penelitian ini adalah pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.
2. Variabel independen adalah variable bebas yang mempengaruhi variable terikat, yang termasuk variable independen dalam penelitian ini adalah :

- a. Lingkungan pengendalian adalah suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas. Efektifitas informasi dan komunikasi serta aktivitas pengendalian sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian.
- b. Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan penerimaan keuangan merupakan penidentifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang relevan dengan penyusunan laporan penerimaan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Resiko yang relevan dengan pelaporan penerimaan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern dan ekstern yang mungkin terjadi dan secara negative berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.
- c. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.
- d. Sitem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi system akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi), dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas

informasi yang dihasilkan dari system tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal.

Komunikasi mencakup penyediaan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

- e. Pemonitoran adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemonitoran ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Di berbagai entitas, auditor intern atau personel yang melakukan pekerjaan serupa memberikan kontribusi dalam memonitor aktivitas entitas. Aktivitas pemonitoran ini dapat mencakup penggunaan informasi dan komunikasi dengan pihak luar dengan keluhan customer dan keluhan dari badan pengatur yang dapat memberikan petunjuk tentang masalah atau bidang yang memerlukan perbaikan.

3.4. Metode Analisis

Dari pengertian *self assessment system* yaitu system pemungutan pajak yang memberi hak penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu atas usahanya secara perorangan. Di mana wajib pajak yang terdaftar dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh secara pribadi, sedangkan

fiskus bertugas memberikan penyuluhan, mengawasi, dan melayani wajib pajak agar pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan wajib pajak dapat berjalan lancar.

Dalam penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan statistic deskriptif dengan prosentase yaitu menganalisis data yang berupa penjelasan atau kata-kata yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai variable-variabel serta hubungan antara variable dengan hasil yang berupa prosentase. Maksudnya, data diukur secara statistic dengan menggunakan exel untuk mencari rata-rata dari data kuisisioner dengan maksud dapat memberikan gambaran mengenai konsep dasar system pengendalian intern (SPI) yang terkait (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta pemantauan).

Hasil rekapitulasi data kuisisioner didukung hasil wawancara langsung kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY serta data yang diperoleh dari KPP Pratama Sleman, DIY, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hubungan system pengendalian intern dengan pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah Sleman.

3.5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Kualitas Data

Uji ini untuk mengetahui item-item pertanyaan mana saja yang valid atau tidak valid.

Item pertanyaan dikatakan valid apabila *corrected item-total correlation* > r table.

Terdiri atas :

1. Uji Validitas

2. Uji Reliabilitas

b. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan. Uji ini untuk mengetahui bahwa semua data telah diproses dari seluruh sampel atau populasi yang ada. Terdiri atas :

1. Uji Normalitas Data

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas mula-mula ditemukan oleh Ragnar Frisch yang berarti adanya hubungan yang linear yang sempurna atau pasti, di antara beberapa atau semua variable yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 1995 : 1995).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan pengujian dengan cara uji koefisien korelasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur derajat asosiasi antar variable penjelas sehingga dapat diketahui ada tidaknya gejala multikolinearitas diantara variable penjelas.

Keputusan adanya multikolinearitas dengan melihat nilai R^2 pada regresi persamaan model pertama dan R^2 pada regresi kedua (r).

- $r > R^2$, maka ada gejala multikolinearitas
- $r < R^2$, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas

c. Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini untuk mengetahui hubungan linier antara variable independen dengan variable terikat. Variable independen yang masuk adalah *SPI* (Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Penghasilan) dengan variable terikat *anggaran penerimaan* (Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan).

d. Uji Statistik

1. Uji F

Uji F adalah uji secara bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

2. Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman secara parsial.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variable dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variable dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2

sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variable tak bebas dengan variable yang menjelaskan.



BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Data

4.1.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Dua dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu KPP Pratama Sleman, KPP Pratama Wonosari, dan KPP Pratama Wates.

Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Sehingga KPP Pratama Sleman selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Dua (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Sleman dan fungsi pemeriksaan dari Karikpa Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Sedangkan launching kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

Gedung Kantor yang dipergunakan untuk operasional KPP Pratama Sleman menempati lantai I dan lantai IV Gedung Kanwil DJP DIY yang terletak di Jl. Ring Road Utara No.10 Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

4.1.1.2. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Sleman meliputi Kabupaten Sleman dengan luas wilayah 57.482 Ha. Terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa/Kelurahan dan 1.212 Dusun. Wilayah di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur, sedang bagian utara sebagian besar tanah kering berupa lading dan pekarangan, serta batas paling utara adalah Gunung Merapi.

Penyumbang PDRB terbesar adalah dari lapangan usaha pertanian. Sedangkan sector usaha yang potensial di KPP Pratama Sleman terutama sector pendidikan, real estate, industry, dan perdagangan.

4.1.1.3. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, terdiri dari seksi-seksi. Adapun pembagiannya terdiri atas:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman D. I. Yogyakarta.
2. Subbagian Umum.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

(Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (ada 4 seksi), Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan).

4. Account Representative (AR)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Struktur organisasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY mempunyai tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya. Berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, Membina Karyawannya yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya, menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah DIY.

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sub Bagian Umum

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan laporan. Bagian Keuangan mempunyai tugas mengurus segala urusan keuangan, sedangkan bagian Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalan potensi perpajakan serta melakukan tugas ekstensifikasi wajib pajak. Bagian Sub Seksi Data Masukan dan Keluaran mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta memeriksa kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran tersebut. Bagian Sub Seksi Pengolahan Data dan penyajian Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan dan penyajian informasi. Sedangkan pada Sub Seksi Penggalan Potensi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak mempunyai tugas melakukan urusan penggalan potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi wajib pajak serta melakukan penyusunan monografi pajak.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan adalah bertugas memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang pajak dan penagihan atas tunggakan wajib pajak. Seksi Penagihan terdiri dari Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak dan Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak, sementara Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

7. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan , pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan, dan penyaluran Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak serta administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV.

Seksi Pengawasan dan konsultasi I, II, III, IV. Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, menyusun profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

9. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, mencari dan menetapkan Wajib Pajak baru agar mempunyai NPWP, Pendataan Objek dan subjek Pajak, penilaian objek Pajak, dan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak perpajakan.

Pembagian tanggung jawab dalam hubungan tujuan pengendalian intern mengacu pada struktur organisasi di atas dan yang secara khusus bertanggungjawab terhadap pelaksanaan system pengendalian intern yaitu sebagai berikut :

- a) Auditor Internal yang tugasnya memeriksa dan mengaudit laporan kinerja dari seluruh kepala divisi.
- b) Kepala divisi yang mengepalai setiap divisi dalam KPP Sleman, meliputi divisi pengolahan data, pelayanan, penagihan, pengawasan, pemeriksaan, dan ekstensifikasi pajak.

4.1.1.4. Aktivitas Kegiatan KPP Pratama Sleman

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY, aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

4.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *self assessment system*, yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Dimana perhitungan jumlah pajak yang terutang didasarkan pada tarif pajak penghasilan yang telah ditetapkan.

4.1.1.6. Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, dan melaksanakan penyitaan jika memang diperlukan.

Penagihan pajak penghasilan dapat dilakukan setelah SKPD diterbitkan. Penerbitan SKPD selalu dicantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran, apabila belum dibayar saat jatuh tempo maka terjadi tunggakan dan dilakukan kegiatan penagihan. Pada saat pembayaran pajak penghasilan telah jatuh tempo dan wajib pajak belum melunasi, maka sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan 7 hari dari masa aktif SKPD (30 hari). Apabila jumlah pajak yang terutang tidak dapat dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang terutang ditagih menggunakan surat paksa. Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, maka pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan asset dari wajib pajak yang bersangkutan. Penyitaan dilakukan 14 hari setelah surat penyitaan asset diterbitkan.

4.1.2. Deskripsi Data

Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap yaitu pembagian kuisisioner kepada responden dan dilanjutkan dengan wawancara. Dari 90 kuisisioner yang dibagikan kepada responden, kuisisioner yang kembali dan bisa diolah oleh peneliti sebanyak 80 (88,89% dari seluruh kuisisioner yang dibagikan), sedangkan 2 kuisisioner lain yang kembali kepada peneliti tidak bisa diolah karena kuisisioner kembali dalam keadaan kosong (belum terisi). Jadi kuisisioner yang dapat digunakan dalam analisis sebanyak 80 atau 88,89% dari total pembagian kuisisioner.

4.1.3. Profil Responden

Data responden yang dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 80 responden. Untuk mendapatkan data yang obyektif mengenai hubungan sistem pengendalian intern dalam menunjang anggaran penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, maka kuesioner diberikan kepada fiskus untuk dijawab berdasarkan dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama melakukan pemeriksaan pajak. Data mengenai karakteristik/profile responden, yang didasarkan pada 9 kriteria/profile responden, yaitu berdasarkan jabatan, jenis kelamin, usia, lama bekerja, pendidikan terakhir, jurusan, sertifikasi, dan pelatihan yang pernah diikuti, serta tingkat pengetahuan pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Profile Responden Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Responden	Persentase %
Kep.Fungsional Kantor Pelayanan Pajak	1	1,25%
Staff Fungsional Kantor Pelayanan Pajak	79	98,75%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa Pegawai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY yang terpilih sebagai responden melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukkan bahwa responden yang menjabat sebagai

Kepala Fungsional Kantor Pelayanan Pajak hanya ada 1 orang dan 79 orang sisanya merupakan staff dari fungsional kantor pelayanan pajak.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Profile Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	49	61,25%
Perempuan	31	38,75%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa pegawai Kantor Pelayanan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY yang bersedia mengembalikan kuisisioner berjumlah 80 orang dengan rincian 49 orang responden laki-laki dan 31 orang responden perempuan.

3. Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Profile Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Persentase %
< 26 tahun	4	5%
26 – 35 tahun	46	57,5%
36 – 45 tahun	21	26,25%
≥ 45 tahun	9	11,25%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.3, dapat disimpulkan, bahwa responden pegawai pajak yang merupakan responden yang diambil dalam penelitian, memiliki usia yang bervariasi, yang mana lebih dominan responden yang berusia 26-35 tahun atau sebanyak 46 orang responden (57,5%) dari total 80 orang responden yang terdaftar.

4. Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Profile Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
< 1 tahun	0	0%
1 – 5 tahun	15	18,75%
5 – 10 tahun	19	23,75%
> 10 tahun	46	57,5%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.4, dapat disimpulkan, bahwa responden pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY rata-rata telah bekerja selama lebih dari 10 tahun.

5. Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Profile Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SD	0	0%
SLTP	1	1,25%
SMA	7	8,75%
D1	11	13,75%
D2	0	0%
D3	19	23,75%
D4	0	0%
S1	35	43,75%
S2	3	3,75%
S3	0	0%
Tidak Diisi	4	5%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.5, dapat disimpulkan, bahwa pendidikan yang dimiliki oleh responden berkisar antara D3 dan S1, pada profile pendidikan terakhir ini tidak dapat digambarkan secara jelas, karena ada beberapa responden untuk tidak mengisi kuesioner tentang pendidikan terakhir, dengan jumlah 4 responden dan persentase 5%.

6. Berdasarkan Jurusan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jurusan dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Profile Responden Berdasarkan Jurusan

Jurusan	Jumlah Responden	Persentase %
Akuntansi	22	27,5%
Manajemen	14	17,5%
Perpajakan	32	40%
Lainnya	5	6,25%
Tidak diisi	7	8,75%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.6, dapat disimpulkan, bahwa profile responden berdasarkan jurusan pada KPP Pratama Sleman, DIY lebih dominan mengambil jurusan perpajakan dengan persentase 40%, sebagiannya lagi adalah jurusan akuntansi.

7. Berdasarkan Sertifikasi

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan sertifikasi dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Profile Responden Berdasarkan Sertifikasi

Sertifikasi	Jumlah Responden	Persentase %
Brevet A & B	8	10%
Brevet A,B&C	3	3,75%
Lain-lain	17	21,25%
Tidak Diisi	52	65%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.7, dapat disimpulkan, bahwa responden yang tidak mengisi criteria berdasarkan sertifikasi yang pernah diikuti sebanyak 52 responden dengan persentase 65%, sedangkan persentase responden yang memiliki sertifikasi brevet A&B serta

brevet A,B,&C yakni masing-masing 8 dan 3 responden atau 10% dan 3,75% sedang yang mengisi lain-lain sebanyak 17 responden (21,25%).

8. Berdasarkan Pelatihan yang Pernah Diikuti

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pelatihan yang pernah diikuti, dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Profile Responden Berdasarkan Pelatihan yang Pernah Diikuti

Pelatihan yang Pernah Diikuti	Jumlah Responden	Persentase %
Audit Teknik	34	42,5%
Audit Sampling	4	5%
Tanpa Pelatihan	42	52,5%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.8, dapat disimpulkan, bahwa responden lebih dominan tidak mendapatkan pelatihan untuk menunjang pelaksanaan penerimaan pajak dengan jumlah responden 42 atau 52,5%, sebagian responden mendapatkan pelatihan Audit Teknik dan Audit Sampling, yang persentase masing-masing adalah 42,5% dan 5%.

9. Berdasarkan Pengetahuan Perpajakan

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pengetahuan pajaknya dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Profile Responden Berdasarkan Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Perpajakan	Jumlah Responden	Persentase %
Sangat Baik	0	0%
Baik	66	82,5%
Cukup	14	17,5%
Kurang	0	0%
Jumlah	80	100%

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Dari tabel 4.9, dapat disimpulkan, bahwa dalam bagian ini peneliti memberikan wewenang kepada responden untuk menilai diri mereka sendiri, mengenai tingkat pengetahuan responden terhadap pengetahuan perpajakan yang menjadi pekerjaannya. Hasilnya, sebagian responden menilai baik terhadap pengetahuan tentang pengetahuan pajaknya dengan jumlah 66 responden, dan 14 responden menilai cukup, artinya responden memahami dengan baik tentang perpajakan dengan persentase 82,5%, sisanya 17,5% responden merasa cukup menguasai atau memahami bidang perpajakan.

4.2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada KPP Pratama Sleman

Analisis atas pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) yang merupakan variabel X, pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuesioner kepada 90 responden dan hanya 80 kuisisioner yang dikembalikan kepada peneliti yang mana untuk menetapkan peringkat dalam setiap tahapan sistem-sistem pengendalian intern dapat dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati, 2007:85

Keterangan :

- a. Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan.
- b. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Dengan kriteria berdasarkan tabel 4.10.

Tabel 4.10
Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1.	20.00% – 36.00%	Tidak Baik
2.	36.01% – 52.00%	Kurang Baik
3.	52.01% – 68.00%	Cukup
4.	68.01% – 84.00%	Baik
5.	84.01% – 100%	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati, 2007:8

Karena sistem pengendalian intern dapat dinilai melalui unsur atau komponen-komponennya, maka kuesioner yang dibuat mencakup 12 pertanyaan yang berkaitan dengan unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi serta pemantauan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Hasil tanggapan responden atas lingkungan pengendalian, dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Lingkungan Pengendalian

No.	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor	%	Kriteria	
		1	2	3	4	5				
1.	Adanya penegakan integritas dan nilai etika kepada para pegawai dapat mempengaruhi kualitas pengendalian.	F	0	0	6	49	25	339	84,75	Sangat baik
		%	0,00	0,00	7,50	61,25	31,25			
2.	Seorang pegawai pajak dituntut memiliki komitmen terhadap kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.	F	0	0	7	28	45	358	89,50	Sangat baik
		%	0,00	0,00	8,75	35,00	56,25			
3.	Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY dibuat agar dapat memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten dalam setiap divisinya.	F	0	4	14	48	14	312	78,00	Baik
		%	0,00	5,00	17,50	60,00	17,50			
4.	Pemeriksaan mendadak terhadap divisi/bagian fungsional kadang dilakukan untuk mengecek pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.	F	0	4	26	42	8	294	73,50	Baik
		%	0,00	5,00	32,50	52,50	10,00			
Total		F	0	8	53	167	92	1303	81,44	Baik
		%	0,00	2,50	16,56	52,19	28,75			

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator lingkungan pengendalian, adalah:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{1303}{(5 \times 4 \times 80)} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{1303}{1600} \times 100\%$$

% skor aktual = 81,44%

Skor 81,44% di atas menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dikategorikan baik.

2. Penilaian Resiko

Hasil tanggapan responden atas penilaian resiko, dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Penilaian Resiko

No.	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor	%	Kriteria	
		1	2	3	4	5				
5.	Adanya identifikasi dan analisis mengenai resiko yang berasal dari dalam maupun luar untuk mengurangi kecurangan atau penyelewengan setoran pajak.	F	2	5	26	33	14	292	73,00	Baik
		%	2,50	6,25	32,50	41,25	17,50			
	Total	f	2	5	26	33	14	292	73,00	Baik
		%	2,50	6,25	32,50	41,25	17,50			

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator penilaian resiko, adalah:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{292}{(5 \times 1 \times 80)} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{292}{400} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 73,00\%$$

Skor 73,00% diatas menunjukkan bahwa penilaian resiko pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dikategorikan baik.

3. Aktivitas Pengendalian

Hasil tanggapan responden atas aktivitas pengendalian, dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Aktifitas Pengendalian

No.	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor	%	Kriteria	
		1	2	3	4	5				
6.	Terdapat pembagian tugas dalam setiap divisi/fungsional yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY.	F	0	3	15	41	21	320	80,00	Baik
		%	0,00	3,75	18,75	51,25	26,25			
7.	Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan prosedur-prosedur dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan pajak.	F	0	4	24	34	18	306	76,50	Baik
		%	0,00	5,00	30,00	42,50	22,50			
	Total	F	0	7	39	75	39	626	78,25	Baik
		%	0,00	4,38	24,37	46,88	24,37			

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator kegiatan pengendalian, adalah:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{626}{(5 \times 2 \times 80)} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{626}{800} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 78,25\%$$

Skor 78,25% di atas menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dikategorikan baik.

4. Informasi & komunikasi

Hasil tanggapan responden atas informasi dan komunikasi, dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Informasi & Komunikasi

No.	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor	%	Kriteria	
		1	2	3	4	5				
8.	Petugas pajak perlu menguasai sarana informasi dan komunikasi yang modern untuk menganalisis keadaan WP yang akan menyetor kewajibannya.	F	0	0	17	43	20	323	80,75	Baik
		%	0,00	0,00	21,25	53,75	25,00			
9.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawainya agar dapat menguasai teknologi informasi dan komunikasi modern untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan.	F	0	6	22	36	16	302	75,50	Baik
		%	0,00	7,50	27,50	45,00	20,00			
10.	Pengembangan sistem informasi dapat mendukung untuk menganalisis data informasi yang diperoleh mengenai profile WP yang akan menyetor kewajibannya.	F	0	3	7	44	26	333	83,25	Baik
		%	0,00	3,75	8,75	55,00	32,50			
Total		F	0	9	46	123	62	958	79,83	Baik
		%	0,00	3,75	19,17	51,25	25,83			

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator informasi & komunikasi, adalah:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{958}{(5 \times 3 \times 80)} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{958}{1200} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 79,83\%$$

Skor 79,83% di atas menunjukkan bahwa informasi & komunikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dikategorikan baik.

5. Pemantauan

Hasil tanggapan responden atas pemantauan, dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pemantauan

No.	Butir Kuesioner	Skor Jawaban Responden					Jumlah Skor	%	Kriteria	
		1	2	3	4	5				
11.	Standard operating procedures (SOP) merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat semata-mata untuk mempermudah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu adanya monitoring dalam pelaksanaannya.	F	0	0	13	51	16	323	80,75	Baik
		%	0,00	0,00	16,25	63,75	20,00			
12.	Adanya evaluasi terpisah dari pihak eksternal KPP Pratama Sleman, DIY terhadap pelaksanaan SOP oleh pegawai pajak yang disertai dengan adanya tindak lanjut atas evaluasi tersebut.	F	0	4	26	41	9	295	73,75	Baik
		%	0,00	5,00	32,50	51,25	11,25			
Total		F	0	4	39	92	25	618	77,25	Baik
		%	0,00	2,50	24,37	57,50	15,63			

Berdasarkan tabel 4.15 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari indikator pemantauan, adalah:

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{618}{(5 \times 2 \times 80)} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = \frac{618}{800} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual} = 77,25\%$$

Skor 77,25% di atas menunjukkan bahwa pemantauan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dikategorikan baik.

Setelah diperoleh angka skor tiap indikator, untuk mengetahui tingkat pelaksanaan sistem pengendalian intern secara keseluruhan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi dan pemantauan dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16
Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Intern

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Lingkungan Pengendalian	1303	1600	81,44	Baik
2.	Penilaian Resiko	292	400	73,00	Baik
3.	Aktivitas Pengendalian	626	800	78,25	Baik
4.	Informasi & Komunikasi	958	1200	79,83	Baik
5.	Pemantauan	618	800	77,25	Baik
Total		3797	4800	79,10	Baik

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa besar persentase skor aktual dari seluruh indikator sistem pengendalian intern dengan menggunakan perhitungan manual, adalah sebagai berikut :

$$\% \text{ skor aktual variabel X} = \frac{\text{jumlah skor indikator (1 + 2 + 3 + 4 + 5)}}{(5 \times 12 \times 80)} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual variabel X} = \frac{(1303 + 292 + 626 + 958 + 618)}{4800} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual variabel X} = \frac{3797}{4800} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor aktual variabel X} = 79,10\%$$

Skor 79,10% di atas, menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, secara keseluruhan dapat dikategorikan baik.

4.3. Deskripsi Hasil Penelitian

Sebelum penulis melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu penulis menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk proses pengolahan data. Berikut ini disajikan data-data tersebut :

Tabel 4.17
Daftar Skor Rata-rata Hasil Kuisisioner
(Variabel X)

No.	Variabel	Skor Rata-rata
1.	Lingkungan Pengendalian	81,44
2.	Penilaian Resiko	73,00
3.	Aktivitas Pengendalian	78,25
4.	Komunikasi dan Informasi	79,83
5.	Pemantauan	77,25

Sumber : Data diolah, Desember 2011

Berdasarkan table di atas kita dapat melihat penilaian variable Sistem Pengendalian Intern yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY. Hampir setiap variable memiliki skor rata-rata di atas baik.

Berdasarkan skor rata-rata yang diperoleh setiap variable, maka dapat dilihat *Sistem Pengendalian Intern* pada KPP Pratama Sleman, DIY tergolong baik.

Tabel 4.18
Daftar Presentase Pencapaian Target Penerimaan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Variabel Y)

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2006	6.939.230.000	6.398.851.034	92,21%
2.	2007	4.822.520.000	3.635.301.871	75,38%
3.	2008	6.334.690.000	5.955.933.002	94,02%
4.	2009	7.666.958.593	11.485.691.073	149,81%
5.	2010	9.299.830.001	8.896.695.101	95,67%
6.	2011	11.302.410.000	8.544.884.419	75,60%
	Total	46.365.638.594	44.917.356.500	96,87%

Berdasarkan table di atas kita dapat melihat bahwa pada tahun anggaran 2006 sampai November 2011 di KPP Pratama Sleman DIY hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan dari tahun ke tahun mengalami perubahan.

4.4. Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat angka koefisien korelasi (r_{xy}) dan nilai signifikansinya (probabilitas statistik) pada item korelasi yang menyatakan hubungan antara skor pertanyaan dengan skor total. Dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 30 responden, maka dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila nilai $r_{xy} > 0,30$, maka dapat dinyatakan

item tersebut valid, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Selanjutnya kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan perhitungan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS 13, maka diperoleh output sebagai berikut :

Tabel 4.19

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Pada table *case processing summary* di atas terlihat bahwa responden yang diteliti pada uji coba kuisisioner berjumlah 30 orang (N=30) dan semua data tidak ada yang *exclude* atau dikeluarkan dari analisis.

Tabel 4.20

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Item-item Variabel

Item	Rxy	Level of significant	Keterangan
X1.1	0,702	0,30	Valid
X1.2	0,717	0,30	Valid
X1.3	0,727	0,30	Valid
X1.4	0,719	0,30	Valid
X2.1	0,723	0,30	Valid
X3.1	0,886	0,30	Valid
X3.2	0,878	0,30	Valid
X4.1	0,748	0,30	Valid
X4.2	0,709	0,30	Valid
X4.3	0,853	0,30	Valid
X5.1	0,889	0,30	Valid
X5.2	0,885	0,30	Valid

Berdasarkan data di atas dapat diketahui item-item pertanyaan mana saja yang valid atau tidak valid. Item pertanyaan dikatakan valid apabila $R_{xy} > Level\ of\ significant$. Dan pertanyaan-pertanyaan dari kelima variable dikatakan valid.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik *cronbach alpha*, dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 30 responden. Suatu instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai $r_{\alpha} > 0,60$. Perhitungan reliabilitas alat ukur penelitian ini dilakukan dengan bantuan program program *SPSS for Windows Release*

13.00. Dari hasil perhitungan semua item diperoleh nilai r alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian diketahui bahwa instrumen penelitian tersebut reliabel. Berikut ini hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian :

Tabel 4.21
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Lingkungan Pengendalian	0,682	0,60	Reliabel
Penilaian Resiko	0,637	0,60	Reliabel
Aktivitas Pengendalian	0,715	0,60	Reliabel
Informasi & Komunikasi	0,648	0,60	Reliabel
Pemantauan	0,729	0,60	Reliabel

Sumber : Data Primer, Diolah, 2011.

Dari Tabel 4.6 tersebut di atas dapat diketahui bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga seluruh pertanyaan dalam kuesioner pada item-item pertanyaan variabel Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan adalah reliabel.

Tabel 4.22

Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,20	Kurang Reliabel
>0,20 – 0,40	Agak Reliabel
>0,40 – 0,60	Cukup Reliabel
>0,60 – 0,80	Reliabel
>0,80 – 1,00	Sangat Reliabel

Sumber : Budi, Tinton Prawira, 2006, SPSS 13.0 Terapan : Riset Statistik

Parametrik, Andi, Yogyakarta, Hal. 248.

4.5. Uji Asumsi Klasik

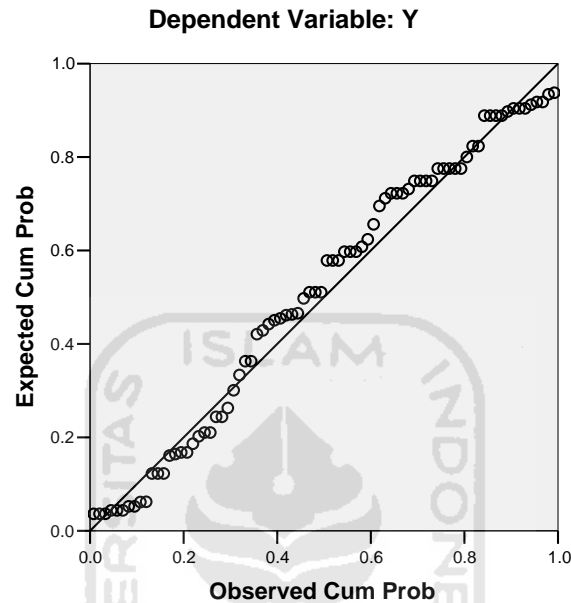
1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini disajikan data hasil output SPSS dengan menggunakan uji normalitas data *P-P Plot* atas variable *Sistem Pengendalian Intern pada KPP Pratama Sleman dan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Gambar 4.1

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar *Normal P-P Plot* untuk variable *Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi* didasarkan pada garis lurus yang melintang dari pojok kiri bawah ke kanan atas membentuk arah diagonal sehingga dapat disebut sebagai garis acuan normalitas. Pada gambar di atas terlihat data yang diwakili dengan titik-titik tersebar di sekitar garis acuan normalitas. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan *Normal P-P Plot* terbukti bahwa data variable *Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi* berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya.

Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinearitas sempurna (*no perfect multikolinearitas*). Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi hubungan linier yang *perfect* atau *exact* diantara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999: 269-270). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.

Kriteria pengujian :

Jika $VIF > 10$, maka H_0 ditolak

Jika $VIF < 10$, maka H_0 diterima

Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sbb :

Tabel 4.23

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF

Variabel	VIF	Nilai Kritis	Keterangan
X ₁	3,720	10	Tidak terkena multikolinearitas
X ₂	3,252	10	Tidak terkena multikolinearitas
X ₃	1,138	10	Tidak terkena multikolinearitas
X ₄	1,262	10	Tidak terkena multikolinearitas
X ₅	3,814	10	Tidak terkena multikolinearitas

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji VIF, 2011.

- Hasil uji :

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan metode VIF, nilai VIF < 10 , artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas, sehingga tidak membiaskan interpretasi hasil analisis regresi.

4.6. Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan program SPSS 13 maka diperoleh nilai regresi linier sebagai berikut :

Tabel 4.24

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X3, X1, PR _a (X2), X4	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel independen yang masuk adalah Sistem Pengendalian Intern (X1 sampai X5) dengan variabel terikat Target (Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan).

Tabel 4.25

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,898 ^a	,807	,794	979672056	1,900

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai $R = 0,898$ dan $R \text{ Square} = 0,807$ atau 80,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 80,7% *Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak*

Penghasilan WP Pribadi dipengaruhi oleh variabel *Sistem Pengendalian Intern (SPI)*. Sementara sisanya sebesar 19,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar model ini.

Tabel 4.26

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3E+020	5	5,939E+019	61,876	,000 ^a
	Residual	7E+019	74	9,598E+017		
	Total	4E+020	79			

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka signifikansi (sig.) yang diperoleh adalah sebesar 0,000. Angka $0,000 < 0,05$ hal tersebut memberikan arti bahwa ada hubungan linier antara variabel *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* dengan variabel *Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan WP Pribadi*. Oleh karena terdapat hubungan linier antara kedua variabel maka variabel *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* mempengaruhi *Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Tabel 4.27
Hasil Regresi Linier Berganda Metode OLS

<i>Variabel</i>	Koefisien Regresi	Standart Error	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	-6516513088,5	1709871360,9	-3,811	0,000
Lingkungan Pengendalian (X ₁)	2338675719,34	832153758,619	2,810	0,006
Penilaian Resiko (X ₂)	731038003,472	340778293,552	2,145	0,035
Aktivitas Pengendalian (X ₃)	168004432,352	172535207,955	0,974	0,333
Informasi & Komunikasi (X ₄)	1628815134,90	738170834,757	2,207	0,030
Pemantauan (X ₅)	1938768757,53	587726857,489	3,299	0,001
R ²	: 0,807			
Adjusted R ²	: 0,794			
F-statistik	: 61,876			
N	: 80			

Sumber: Hasil Regresi Linier Berganda Metode OLS, 2011.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows Release 13.00* diperoleh hasil persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut :

$$Y = -6516513088,5 + 2338675719,34X_1 + 731038003,472X_2 + 168004432,352X_3 + 1628815134,90X_4 + 1938768757,53X_5$$

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

a. Konstanta (b_0) = -6516513088,5

Artinya apabila variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5), maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) sama dengan nol (tidak ada perubahan) sebesar -6516513088,5.

b. Koefisien regresi lingkungan pengendalian (b_1) = 2338675719,34

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Lingkungan Pengendalian (X1) meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel X_2 , X_3 , X_4 , dan X_5 konstan.

c. Koefisien regresi penilaian resiko (b_2) = 731038003,472

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Penilaian Resiko (X2) meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel X_1 , X_3 , X_4 , dan X_5 konstan.

d. Koefisien regresi aktivitas pengendalian (b_3) = 168004432,352

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Aktifitas Pengendalian (X3) meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_4 , dan X_5 konstan.

e. Koefisien regresi informasi dan komunikasi (b_4) = 1628815134,90

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Informasi dan Komunikasi (X4) meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_5 konstan.

f. Koefisien regresi pemantauan (b_5) = 1938768757,53

Koefisien regresi positif (searah) artinya, jika Pemantauan (X5) meningkat, maka penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) akan meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi variabel X_1 , X_2 , X_3 dan X_4 konstan.

4.7. Uji Statistik

1. Uji F

Uji F adalah uji secara bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

a. Perumusan hipotesis

1). $H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = b_5 = 0$ (Tidak ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

2). $H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq b_4 \neq b_5 \neq 0$ (Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian

(X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

b. Kriteria pengujian

1). Bila probabilitas $F_{\text{-statistik}} \geq \text{Level of Significant (0,05)}$, maka H_0 diterima, artinya secara simultan variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

2). Bila probabilitas $F_{\text{-statistik}} < \text{Level of Significant (0,05)}$, maka H_0 ditolak, artinya secara simultan variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

3). Dengan *level of significant* (α) 5 % dan diperoleh nilai $F_{\text{-hitung}} = 61,876$ dan probabilitas $F_{\text{-hitung}} = 0,000$.

4). Kesimpulan :

Diperoleh nilai probabilitas $F_{\text{-hitung}} = 0,000 < \text{Level of Significant} = 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya ada pengaruh secara bersama-sama variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

2. Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh antara variabel Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman secara parsial. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *SPSS for Windows Release 13.00* dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a. Pengujian pengaruh variabel Lingkungan Pengendalian (X₁) dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

- Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai $t_{\text{-statistik}} = 2,810$ dengan probabilitas-statistik = 0,006.
- Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,006 < *Level of Significant* = 0,05, maka diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara Lingkungan Pengendalian (X₁) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

b. Pengujian pengaruh variabel Penilaian Resiko (X₂) dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

- Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai $t_{\text{-statistik}} = 2,145$ dengan probabilitas-statistik = 0,035.
- Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,035 < *Level of Significant* = 0,05, maka diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara Penilaian

Resiko (X_2) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

c. Pengujian pengaruh variabel Aktifitas Pengendalian (X_3) dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

- Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai $t_{\text{-statistik}} = 0,974$ dengan probabilitas-statistik = 0,333.
- Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,333 > *Level of Significant* = 0,05, maka diketahui bahwa tidak berpengaruh signifikan antara Aktifitas Pengendalian (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

d. Pengujian pengaruh Informasi dan Komunikasi (X_4) dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

- Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai $t_{\text{-statistik}} = 2,207$ dengan probabilitas-statistik = 0,030.
- Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = 0,030 < *Level of Significant* = 0,05, maka diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara Informasi dan Komunikasi (X_4) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

e. Pengujian pengaruh variabel Pemantauan (X_5) dengan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

- Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan hasil perhitungan regresi linier berganda diperoleh nilai $t_{\text{-statistik}} = 3,299$ dengan probabilitas-statistik = 0,001.

- Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai probabilitas-statistik = $0,001 < Level\ of\ Significant = 0,05$, maka diketahui bahwa ada pengaruh signifikan antara Pemantauan (X5) terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y).

3. R^2 (Koefisien Determinasi)

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi atau *R Square*) sebesar 0,807 artinya variabel dependen (Y) dalam penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman (Y) dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Resiko (X2), Aktivitas Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), dan Pemantauan (X5) sebesar 80,7%, sedangkan sisanya sebesar 19,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.8. Pembahasan

Pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan yang menembus seluruh organisasi. Pengendalian intern berada dalam proses manajemen dasar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pengendalian intern bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam proses manajemen tersebut. Pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan adalah hasil akhir yang diperoleh dari pajak penghasilan atas rencana, anggaran, ataupun harapan pendapatan yang telah ditetapkan dengan menggunakan data tahun sebelumnya.

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjelaskan hasil dari kuesioner yang telah disebarkan untuk mengetahui dan menganalisis peranan sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY.

Dari hasil perhitungan skor aktual dan ideal untuk sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dapat dilihat pada tabel 4.28.

Tabel 4.28
Rekapitulasi tanggapan Responden atas Keseluruhan Unsur/Komponen Sistem Pengendalian Intern

No.	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kriteria
1.	Lingkungan Pengendalian	1303	1600	81,44	Baik
2.	Penilaian Resiko	292	400	73,00	Baik
3.	Kegiatan Pengendalian	626	800	78,25	Baik
4.	Informasi & Komunikasi	958	1200	79,83	Baik
5.	Pemantauan	618	800	77,25	Baik
Total		3797	4800	79,10	Baik

Analisis atas pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 81,44%, yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari adanya penegakan integritas dan nilai etika kepada para pegawainya, memiliki komitmen terhadap kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, struktur organisasi yang dibuat dapat memberikan kejelasan tanggung jawab dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten serta dilakukannya pemeriksaan dadakan (sidak) untuk mengecek pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Penilaian resiko pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 73,00% yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari resiko kecurangan dan penyelewengan setoran pajak yang kecil setelah dilakukan identifikasi dan analisis resiko.
3. Kegiatan pengendalian pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, sudah baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 78,25% yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari adanya pembagian dalam setiap divisi/fungsional dan adanya pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan prosedur-prosedur pada kantor pajak.
4. Informasi & komunikasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 79,83% yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari pegawai pajak yang telah menguasai sarana informasi dan komunikasi modern, adanya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan untuk menguasai sarana informasi dan komunikasi modern dan terus dilakukannya pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung dalam menganalisis data informasi yang diperoleh mengenai wajib pajak.
5. Pemantauan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, sudah sangat baik, hal ini terlihat dari persentase total skor tanggapan responden sebesar 77,25% yang masuk pada kategori baik. Kategori baik ini dapat dilihat dari adanya pengawasan terhadap pelaksanaan *standard operating procedures* (SOP) yang dibuat untuk mempermudah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan adanya

evaluasi terpisah dari pihak eksternal yang dilakukan terhadap pelaksanaan *standard operating procedures* (SOP) yang disertai dengan adanya tindak lanjut atas evaluasi tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan sistem pengendalian intern yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik (skor tanggapan responden sebesar 79,10%), yang termasuk kedalam kategori baik.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh **Lawrence B. Sawyer**, yaitu “**Unsur-unsur/komponen-komponen system pengendalian intern :**

- 1. Lingkungan Pengendalian.**
- 2. Penilaian Resiko.**
- 3. Aktivitas Pengendalian.**
- 4. Informasi dan Komunikasi.**
- 5. Pengawasan.”**

Dari semua hasil perhitungannya diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) mempunyai koefisien korelasi yang kuat dan positif (+) dalam menunjang penerimaan pajak, yang ditunjukkan oleh angka hasil koefisien korelasi yang kuat yaitu sebesar 0,807. Ini berarti bahwa apabila sistem pengendalian internnya baik, maka pencapaian penerimaan pajak pun menjadi semakin baik.

Analisis Kualitatif

Dalam analisis kualitatif ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitiannya. Berdasarkan hasil perhitungan/analisis kualitatif yang telah dilakukan atas sistem pengendalian intern bahwa untuk mengetahui pelaksanaan dari sistem

pengendalian intern digunakan perhitungan skor aktual dan ideal yang apabila semakin besar skor yang dihasilkan, maka pelaksanaan atas sistem pengendalian intern pada kantor pelayanan pajak akan semakin baik.

Pengujian regresi antara *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* dengan *pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan* berdasarkan metode regresi linier berganda memberikan hasil bahwa ada pengaruh antara *Sistem Pengendalian Intern (SPI)* dengan *pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan*. Hal ini menunjukkan bahwa 80,7% *pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan* dipengaruhi oleh variable *system pengendalian intern (SPI)*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan sistem pengendalian inter (SPI) dalam menunjang pencapaian penerimaan pajak penghasilan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian intern (SPI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY sudah termasuk baik. Artinya unsur atau komponen-komponen sistem pengendalian intern pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penilaian atas ke lima (5) unsur atau komponen sistem pengendalian intern (SPI) yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan/aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi serta pemantauan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa sistem pengendalian intern (SPI) mempunyai peranan dalam menunjang pencapaian anggaran penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, artinya semakin baik sistem pengendalian intern (SPI), maka pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan akan semakin baik dan sebaliknya, semakin buruk sistem pengendalian intern (SPI), maka pencapaian anggaran penerimaan pajak penghasilan akan semakin buruk.

5.2 Keterbatasan

Beberapa keterbatasan yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian diantaranya adalah :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas enam tahun yaitu tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2011.
2. Adanya perubahan peraturan dan perombakan system administrasi perpajakan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak, menimbulkan keterbatasan akses bagi peneliti untuk mendapatkan data-data yang lebih akurat dari pihak aparat pajak.
3. Sampel yang didapatkan kurang representatif karena semua responden bukan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sleman sendiri, melainkan pegawai di badan tersebut yang bekerja sesuai *Standart Operating Procedure* yang ada. Sehingga jawaban dari responden dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan bersifat subyektif, artinya memberikan nilai poin yang baik terhadap pengendalian intern di instansi dimana mereka bekerja.

5.3 Saran

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, terutama pada instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, DIY. Selama dilakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa hal yang memerlukan suatu perubahan atau peningkatan, terutama pada divisi fungsional pemeriksaan pajak, dimana pada divisi ini para pegawainya di tuntut untuk mempunyai kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya untuk meminimalisir resiko atau kemungkinan buruk yang terjadi, sehingga peneliti memberikan beberapa saran-saran, sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, disarankan untuk menyusun suatu kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Dimana pembinaan sumber daya manusia ini mencakup penetapan kebijakan dan prosedur sejak *recruitment* sampai dengan pemberhentian pegawai, penelusuran latar belakang calon *recruitment* yang memadai terhadap pegawai dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY, selain mendapat pemeriksaan dari pihak komite audit pemerintah/dari BPKP (pihak eksternal), disarankan untuk membentuk suatu komite audit internal juga, sehingga pelaksanaan dari sistem pengendalian intern Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY dapat terus diawasi dan penyimpangan-penyimpangan dapat lebih cepat ditindaklanjuti.
3. Bagi para petugas pajak disarankan untuk mengikuti pendidikan Brevet A, Brevet B dan Brevet C, agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam bidang Perpajakan, yang akan berguna pada saat melaksanakan kegiatan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang *sistem pengendalian intern pemerintah*.

Hadi Syamsul. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan*. Ekonisia. Yogyakarta.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesi*. Salemba Empat. Jakarta.

Brotodihardjo , R. Santoso , S.H. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak , edisi ketiga*. PT.Eresco. Bandung.

Mulyadi. 1993. *Sistem Akuntansi* , edisi 3 . Yogyakarta : STIE YKPN.

Waluyo dan Ilyas. 1999. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.

KPP Pratama Sleman DIY. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Anggaran 2006 s/d 2011 Sleman, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Muqodim. 2002. *Taxation in Indonesia*. Ekonisia. Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Hadi, Syamsul. 2006. *Memanfaatkan Excel Untuk Analisis Statistik*. Ekonisia.

Yogyakarta.

Anisa, (2007) “*Pengaruh Struktur Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak*

Reklame Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Reklame”,

Skripsi S1. Universitas Pembangunan Nasional. Jakarta.

Trie, (2007) “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pajak Kendaraan Bermotor*

Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor”,

Skripsi S1. Universitas Pembangunan Nasional. Yogyakarta.

Sudarmanto, Gunawan R. 2005. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*.

Graha Ilmu. Yogyakarta.

Wibowo Eri dkk. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2000. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta. Bandung.



LAMPIRAN



Kepada Yth:

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang mengirim kuisisioner ini

Nama : Hermawan

No. Mahasiswa : 08312429

Posisi Sebagai : Mahasiswa Fakultas Ekonomi UII

Mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk mendukung penelitian dalam rangka penulisan skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencapaian Anggaran Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kab. Sleman 2006-2011”** dengan mengisi kuisisioner terlampir.

Saya menyadari bahwa waktu merupakan hal yang berharga untuk Bapak/Ibu, namun saya juga yakin bahwa penelitian ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan dukungan dari responden. Data yang saya butuhkan hanya merupakan persepsi Bapak/Ibu, tidak ada maksud apa-apa dibalik pengisian kuisisioner kecuali guna penelitian ilmiah yang sedang saya teliti. Selanjutnya data yang saya peroleh akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Kesit Bambang Prakosa, Drs.,MAP

Hermawan

IDENTITAS DIRI

Nama (boleh inisial) :
Umur (sampai th 2011) :
Jenis kelamin : L / P
Gelara Akademis Terakhir : (SMA / D1 / D3 / D4 / S1/ S2 / S3)
Jurusan : (Akuntansi / Manajemen / Lain-lain)
Sertifikasi : (Brevet A&B / Brevet A,B&C / Lain-lain)
Jabatan : (Kepala / Staff)
Lama kerja (sampai th 2011) : (<1th / 1-5th / 5-10th / >10th)
Pelatihan yang pernah : (Audit Teknik / Audit Sampling / Tanpa Pelatihan)
Pengetahuan pajak : (Sangat Baik / Baik / Cukup / Kurang)
Diikuti

***coret yang tidak sesuai**

PETUNJUK PENGISIAN

Bacalah baik-baik setiap point kuisisioner berikut dan pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu dengan memberi tanda sesuai dengan petunjuk pada setiap pernyataan di atasnya.

TB : Tidak Baik

KB : Kurang Baik

CB : Cukup Baik

B : Baik

SB : Sangat Baik

KUISIONER

No.	Butir Kuisisioner	TB	KB	CB	B	SB
1.	Adanya penegakan integritas dan nilai etika kepada para pegawai dapat mempengaruhi kualitas pengendalian.	1	2	3	4	5
2.	Seorang pegawai pajak dituntut memiliki komitmen terhadap kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.	1	2	3	4	5
3.	Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY dibuat agar dapat memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten dalam setiap divisinya.	1	2	3	4	5
4.	Pemeriksaan mendadak terhadap divisi/bagian fungsional kadang dilakukan untuk mengecek pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.	1	2	3	4	5
5.	Adanya identifikasi dan analisis mengenai resiko yang berasal dari dalam maupun luar untuk mengurangi kecurangan atau penyelewengan setoran pajak.	1	2	3	4	5
6.	Terdapat pembagian tugas dalam setiap divisi/fungsional yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman Yogyakarta.	1	2	3	4	5
7.	Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak melaksanakan prosedur-prosedur dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan pajak.	1	2	3	4	5
8.	Petugas pajak perlu menguasai sarana informasi dan komunikasi yang modern untuk menganalisis keadaan WP yang akan menyetor kewajibannya.	1	2	3	4	5
9.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman, DIY memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawainya agar dapat menguasai	1	2	3	4	5

	teknologi informasi dan komunikasi modern untuk mempermudah pekerjaan yang dilakukan.					
10.	Pengembangan sistem informasi dapat mendukung untuk menganalisis data informasi yang diperoleh mengenai profile WP yang akan menyetor kewajibannya.	1	2	3	4	5
11.	Standard operating procedures (SOP) merupakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat semata-mata untuk mempermudah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu adanya monitoring dalam pelaksanaannya.	1	2	3	4	5
12.	Adanya evaluasi terpisah dari pihak eksternal KPP Pratama Sleman Yogyakarta terhadap pelaksanaan SOP oleh pegawai pajak yang disertai dengan adanya tindak lanjut atas evaluasi tersebut.	1	2	3	4	5
	Total					

Kriteria Persentase Tanggapan Responden

No.	% Jumlah Skor	Kriteria
1.	20.00% – 36.00%	Tidak Baik
2.	36.01% – 52.00%	Kurang Baik
3.	52.01% – 68.00%	Cukup Baik
4.	68.01% – 84.00%	Baik
5.	84.01% – 100%	Sangat Baik

Sumber: Umi Narimawati, 2007:8

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

Correlations

		LP1	LP2	LP3	LP4	X1
LP1	Pearson Correlation	1	,330	,401*	,291	,702**
	Sig. (2-tailed)		,075	,028	,118	,000
	N	30	30	30	30	30
LP2	Pearson Correlation	,330	1	,376*	,394*	,717**
	Sig. (2-tailed)	,075		,041	,031	,000
	N	30	30	30	30	30
LP3	Pearson Correlation	,401*	,376*	1	,318	,727**
	Sig. (2-tailed)	,028	,041		,087	,000
	N	30	30	30	30	30
LP4	Pearson Correlation	,291	,394*	,318	1	,719**
	Sig. (2-tailed)	,118	,031	,087		,000
	N	30	30	30	30	30
X1	Pearson Correlation	,702**	,717**	,727**	,719**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,682	4

Correlations

Correlations

		PR1	X2
PR1	Pearson Correlation	1	,723**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	30	30
X2	Pearson Correlation	,723**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,637	1

Correlations

Correlations

		AP1	AP2	X3
AP1	Pearson Correlation	1	,557**	,886**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000
	N	30	30	30
AP2	Pearson Correlation	,557**	1	,878**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000
	N	30	30	30
X3	Pearson Correlation	,886**	,878**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,715	2

Correlations

Correlations

		IK1	IK2	IK3	X4
IK1	Pearson Correlation	1	,174	,591**	,748**
	Sig. (2-tailed)		,358	,001	,000
	N	30	30	30	30
IK2	Pearson Correlation	,174	1	,407*	,709**
	Sig. (2-tailed)	,358		,025	,000
	N	30	30	30	30
IK3	Pearson Correlation	,591**	,407*	1	,853**
	Sig. (2-tailed)	,001	,025		,000
	N	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	,748**	,709**	,853**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,648	3

Correlations

Correlations

		P1	P2	X5
P1	Pearson Correlation	1	,573**	,889**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000
	N	30	30	30
P2	Pearson Correlation	,573**	1	,885**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000
	N	30	30	30
X5	Pearson Correlation	,889**	,885**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,729	2

Statistik Deskriptif

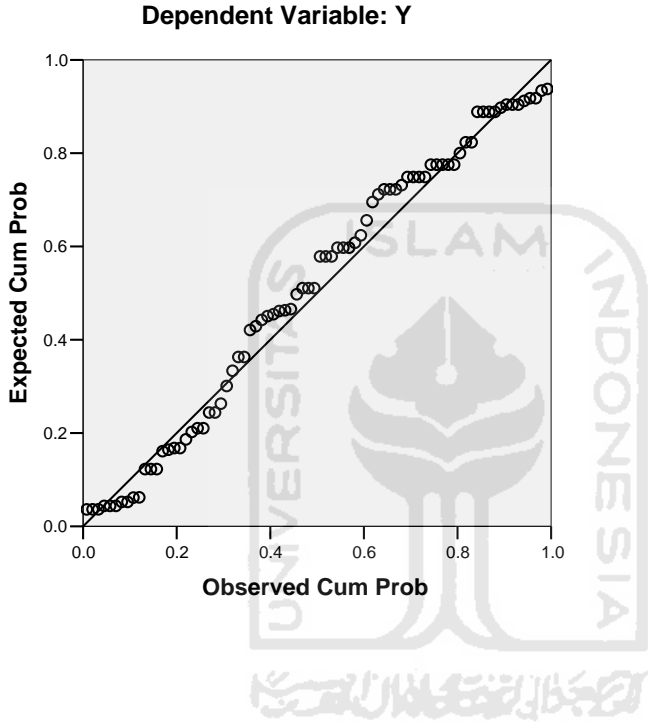
Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LP1	80	3	5	4,21	,610
LP2	80	3	5	4,41	,706
LP3	80	2	5	3,99	,720
LP4	80	2	5	3,71	,783
X1	80	3,00	5,00	4,0813	,41295
PR (X2)	80	1,00	5,00	3,6500	,92913
AP1	80	2	5	3,90	,866
AP2	80	2	5	3,80	,877
X3	80	2,00	5,00	3,8500	,68158
IK1	80	2	5	4,03	,729
IK2	80	2	5	3,85	,873
IK3	80	2	5	4,11	,795
X4	80	2,00	5,00	3,9958	,50110
P1	80	2	5	4,00	,694
P2	80	2	5	3,68	,742
X5	80	2,00	5,00	3,8375	,56689
Y	80	3635301871	11485691073	7486226083,33	2737140816
Valid N (listwise)	80				

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil Regresi Linier Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X5, X3, X1, PR _g (X2), X4	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,898 ^a	,807	,794	979672056	1,900

- a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, PR (X2), X4
 b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3E+020	5	5,939E+019	61,876	,000 ^a
	Residual	7E+019	74	9,598E+017		
	Total	4E+020	79			

- a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, PR (X2), X4
 b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-6516513088,5	1709871360,9		-3,811	,000		
	X1	2338675719,34	832153758,619	,447	2,810	,006	,103	3,720
	PR (X2)	731038003,472	340778293,552	,315	2,145	,035	,121	3,252
	X3	168004432,352	172535207,955	,053	,974	,333	,878	1,138
	X4	1628815134,90	738170834,757	,378	2,207	,030	,888	1,262
	X5	1938768757,53	587726857,489	,509	3,299	,001	,109	3,814

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2E+009	1E+010	7E+009	1938706201	80
Std. Predicted Value	-2,465	1,992	,000	1,000	80
Standard Error of Predicted Value	2E+008	6E+008	3E+008	81840573,779	80
Adjusted Predicted Value	2E+009	1E+010	7E+009	1988413949	80
Residual	-2E+009	2E+009	,000	948163067,5	80
Std. Residual	-1,795	1,535	,000	,968	80
Stud. Residual	-1,836	1,877	,002	1,009	80
Deleted Residual	-2E+009	2E+009	5797728	1036825021	80
Stud. Deleted Residual	-1,866	1,910	,000	1,017	80
Mahal. Distance	1,337	27,013	4,938	4,437	80
Cook's Distance	,000	,322	,017	,046	80
Centered Leverage Value	,017	,342	,063	,056	80

a. Dependent Variable: Y

Daftar Presentase Pencapaian Target Penerimaan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Variabel Y)

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2006	6.939.230.000	6.398.851.034	92,21%
2.	2007	4.822.520.000	3.635.301.871	75,38%
3.	2008	6.334.690.000	5.955.933.002	94,02%
4.	2009	7.666.958.593	11.485.691.073	149,81%
5.	2010	9.299.830.001	8.896.695.101	95,67%
6.	2011	11.302.410.000	8.544.884.419	75,60%
	Total	46.365.638.594	44.917.356.500	96,87%



Rekapitulasi Data Penelitian

Resp.	LP1	LP2	LP3	LP4	X1	PR (X2)	AP1	AP2	X3	IK1	IK2	IK3	X4	P1	P2	X5
1	3	5	5	4	4,25	3	3	5	4,00	4	4	5	4,33	3	4	3,50
2	5	4	4	3	4,00	4	2	2	2,00	5	3	5	4,33	4	3	3,50
3	5	4	5	3	4,25	2	3	3	3,00	5	3	5	4,33	5	4	4,50
4	4	5	3	4	4,00	3	5	5	5,00	4	5	3	4,00	4	2	3,00
5	5	3	5	3	4,00	3	4	5	4,50	5	2	3	3,33	4	5	4,50
6	3	4	4	3	3,50	4	5	2	3,50	4	4	5	4,33	3	4	3,50
7	4	4	2	5	3,75	5	5	3	4,00	3	4	4	3,67	5	3	4,00
8	5	5	4	5	4,75	1	4	4	4,00	3	5	5	4,33	4	3	3,50
9	5	3	4	3	3,75	4	5	3	4,00	3	4	4	3,67	4	3	3,50
10	5	5	3	3	4,00	3	2	2	2,00	4	4	5	4,33	5	5	5,00
11	5	5	4	3	4,25	5	2	4	3,00	5	3	4	4,00	4	4	4,00
12	4	4	5	4	4,25	2	3	3	3,00	5	5	5	5,00	4	3	3,50
13	5	5	5	5	5,00	5	3	4	3,50	4	2	5	3,67	4	3	3,50
14	4	5	4	2	3,75	3	3	3	3,00	5	5	5	5,00	5	4	4,50
15	4	4	4	5	4,25	3	3	3	3,00	3	5	3	3,67	5	4	4,50
16	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3,00	4	4	4	4,00	2	2	2,00
17	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3,00	5	3	4	4,00	3	3	3,00
18	3	5	4	3	3,75	4	5	5	5,00	3	3	3	3,00	3	3	3,00
19	5	4	3	3	3,75	4	5	5	5,00	3	4	4	3,67	5	5	5,00
20	4	5	4	3	4,00	4	2	2	2,00	4	4	4	4,00	4	4	4,00
21	5	4	4	3	4,00	4	4	4	4,00	5	5	5	5,00	4	4	4,00
22	3	3	3	3	3,00	5	5	5	5,00	2	2	2	2,00	4	4	4,00

Resp.	LP1	LP2	LP3	LP4	X1	PR (X2)	AP1	AP2	X3	IK1	IK2	IK3	X4	P1	P2	X5
23	3	3	3	3	3,00	4	3	3	3,00	3	3	3	3,00	3	3	3,00
24	5	5	5	5	5,00	3	3	3	3,00	5	5	5	5,00	5	4	4,50
25	5	5	5	5	5,00	5	3	3	3,00	5	5	5	5,00	5	5	5,00
26	5	4	4	4	4,25	4	3	3	3,00	4	4	4	4,00	3	3	3,00
27	4	4	4	4	4,00	2	5	5	5,00	5	5	5	5,00	3	3	3,00
28	5	5	5	5	5,00	4	3	3	3,00	4	4	4	4,00	3	3	3,00
29	4	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4,00
30	5	5	5	5	5,00	5	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4,00
31	5	3	4	4	4,00	4	5	3	4,00	3	3	4	3,33	5	4	4,50
32	4	4	5	3	4,00	3	4	4	4,00	4	3	2	3,00	5	4	4,50
33	4	4	3	3	3,50	3	5	3	4,00	5	4	4	4,33	4	4	4,00
34	4	5	4	3	4,00	3	3	3	3,00	5	3	5	4,33	4	4	4,00
35	4	4	4	5	4,25	3	4	4	4,00	3	3	5	3,67	4	4	4,00
36	4	4	4	4	4,00	2	4	5	4,50	4	3	4	3,67	5	2	3,50
37	4	4	5	4	4,25	5	3	4	3,50	4	4	3	3,67	4	3	3,50
38	4	5	2	4	3,75	4	3	4	3,50	4	4	4	4,00	4	3	3,50
39	5	5	5	2	4,25	5	5	3	4,00	4	4	3	3,67	4	4	4,00
40	4	5	4	4	4,25	3	5	3	4,00	4	4	5	4,33	4	3	3,50
41	4	5	3	3	3,75	3	5	4	4,50	4	2	5	3,67	4	4	4,00
42	4	5	4	4	4,25	5	4	5	4,50	3	5	4	4,00	4	4	4,00
43	4	5	4	3	4,00	5	4	4	4,00	3	5	4	4,00	4	4	4,00
44	4	5	4	3	4,00	4	4	4	4,00	3	5	4	4,00	5	4	4,50
45	4	5	5	3	4,25	4	4	5	4,50	4	4	4	4,00	4	3	3,50
46	5	3	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	2	4	3,33	5	3	4,00

Resp.	LP1	LP2	LP3	LP4	X1	PR (X2)	AP1	AP2	X3	IK1	IK2	IK3	X4	P1	P2	X5
47	4	5	3	5	4,25	4	2	4	3,00	5	4	4	4,33	3	5	4,00
48	4	5	4	2	3,75	4	5	3	4,00	4	3	4	3,67	4	4	4,00
49	4	5	4	5	4,50	4	5	4	4,50	4	4	4	4,00	4	4	4,00
50	4	4	4	4	4,00	4	4	3	3,50	4	4	4	4,00	4	4	4,00
51	4	5	4	3	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4	4,00	4	4	4,00
52	4	5	4	4	4,25	3	5	4	4,50	4	5	2	3,67	5	5	5,00
53	4	4	4	4	4,00	3	5	4	4,50	3	4	4	3,67	3	3	3,00
54	4	5	5	3	4,25	4	3	5	4,00	4	4	5	4,33	4	4	4,00
55	5	4	4	4	4,25	4	4	2	3,00	4	4	4	4,00	4	4	4,00
56	4	5	3	4	4,00	5	3	5	4,00	4	5	4	4,33	3	4	3,50
57	4	4	4	4	4,00	4	4	3	3,50	3	5	4	4,00	4	4	4,00
58	4	3	4	3	3,50	5	5	4	4,50	4	3	5	4,00	4	4	4,00
59	4	5	4	4	4,25	4	4	5	4,50	4	4	5	4,33	4	4	4,00
60	4	4	4	4	4,00	4	5	4	4,50	5	4	5	4,67	4	2	3,00
61	4	5	4	4	4,25	4	5	3	4,00	5	3	4	4,00	4	4	4,00
62	4	5	4	4	4,25	4	5	4	4,50	5	3	3	3,67	4	4	4,00
63	5	4	4	4	4,25	2	4	4	4,00	4	4	4	4,00	5	4	4,50
64	5	5	4	3	4,25	3	4	3	3,50	4	5	4	4,33	3	5	4,00
65	3	4	5	3	3,75	5	4	3	3,50	4	4	4	4,00	4	3	3,50
66	5	5	4	5	4,75	1	4	4	4,00	3	5	4	4,00	4	4	4,00
67	4	4	4	4	4,00	4	3	5	4,00	4	4	4	4,00	4	3	3,50
68	5	5	4	2	4,00	5	4	4	4,00	4	4	4	4,00	5	4	4,50
69	5	4	2	4	3,75	3	4	4	4,00	4	5	4	4,33	4	4	4,00
70	4	5	4	4	4,25	4	4	4	4,00	4	3	2	3,00	5	3	4,00

Resp.	LP1	LP2	LP3	LP4	X1	PR (X2)	AP1	AP2	X3	IK1	IK2	IK3	X4	P1	P2	X5
71	4	5	4	4	4,25	4	4	5	4,50	4	4	3	3,67	5	4	4,50
72	4	5	5	4	4,50	3	4	4	4,00	4	4	4	4,00	3	3	3,00
73	4	3	4	4	3,75	3	4	4	4,00	5	4	5	4,67	4	3	3,50
74	4	5	4	4	4,25	3	4	5	4,50	5	3	5	4,33	4	4	4,00
75	4	5	4	4	4,25	3	4	4	4,00	3	4	4	3,67	4	5	4,50
76	4	5	3	4	4,00	3	4	4	4,00	4	3	5	4,00	4	3	3,50
77	4	5	4	4	4,25	4	4	5	4,50	3	5	4	4,00	3	3	3,00
78	4	5	5	4	4,50	4	4	3	3,50	5	2	5	4,00	4	3	3,50
79	4	4	4	4	4,00	3	4	5	4,50	5	4	4	4,33	3	3	3,00
80	5	4	4	4	4,25	3	4	5	4,50	4	3	5	4,00	3	5	4,00

